

Amin Sudarsono

MENGEMBALIKAN HAK UMAT



Pengalaman
Nahdliyyin Center
Pekalongan dalam
Membangun dan
Memberdayakan
Komunitas



PATTIRO

Mengembalikan Hak Umat

Pengalaman Nahdliyyin Center Pekalongan dalam Membangun dan Memberdayakan Komunitas

ISBN 978-979-16063-5-6

Penulis

Amin Sudarsono (koordinator)

Aminudin Aziz

Sugiharto

Setiawan Dwi Hariyanto

Budhi Prathamo

Desain sampul dan tata letak

Tugas Suprianto

Cetakan I, Januari 2010

Cetakan II, Desember 2012

Buku ini diterbitkan atas kerjasama

PATTIRO dengan The Asia Foundation

PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional)

Jl Intan No 81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430

Indonesia

Telp. 021-7591 5498 / 7591 5546

Fax: 021-751 2503

Email: info@pattiro.org

Buku ini adalah milik umat dan bebas untuk diperbanyak—selain untuk
kepentingan komersial. Jika akan mencetak dan menggandakan dalam
jumlah banyak, mohon mengirimkan pemberitahuan kepada PATTIRO
atau Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

- The Asia Foundation: John Brownlee
- Ketua PB NU: KH Masdar F. Mas'udi
- Pengantar Penulis

Bab 1: Community Center untuk Lebih Berdaya

- Terbukanya Keran Partisipasi
- Community Center, Apa dan Mengapa?
- Membentuk *Community Center*
- Pelayanan Publik di Kota Batik
- NU sebagai Jembatan Kepentingan

Bab 2: Sejarah Nahdliyyin Center

- Pertemuan Dua Kegelisahan
- Merangkul para *Masyayikh*
- Malam-malam Panjang
- Momentum Konfercab NU
- Mendapat Pengesahan Struktual
- Pembentukan NC di Kelurahan
- Kendala dan Solusi
- Keberlanjutan Organisasi

Bab 3: Profil Nahdliyyin Center

- Siapakah Relawan NC?
- Apa Tugas dan Fungsi NC?
- Apa yang Dilakukan Relawan NC?
 - Sektor Kesehatan
 - Sektor Pendidikan
 - Sektor Ekonomi
- Model Kerja
- Pola Pertanggungjawaban

Bab 4: Meniru Sukses Nahdliyyin Center

- Potensi NU secara Organisasi dan Budaya
- Skema Pembentukan NC
- Pola Pendanaan
- Pemberian Internal
- Dampak Umum

Daftar Pustaka

Lampiran



MEMBANGUN NU YANG PEDULI UMATNYA

KH Masdar Farid Mas'udi

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

“Telah datang kepada kalian seorang Rasul pembawa agama yang begitu peduli; baginya kepedihan kalian adalah kepedihannya, dan kebahagiaan kalian itulah kebahagiaannya...”

-----**QS. At-Taubah: 128**

ISLAM datang ke bumi bukan untuk kepentingan Allah (yang Maha Kaya) maupun ajaran Islam itu sendiri—karena Islam sudah sempurna. Islam adalah rahmat Allah bagi umat manusia untuk kemuliaan manusia sendiri secara lahir dan batin, jasmani dan ruhani, personal dan sosial.

Oleh sebab itu, menurut saya, rahmat keberislaman hanya bisa dibangun melalui empat tahap: pertama, tahap membulatkan kepedulian yang mendalam terhadap problem kemanusiaan; kedua, mendefinisikan akar problem kemanusiaan itu secara kritis; ketiga, merumuskan kerangka perubahan (transformasi); dan keempat, langkah-langkah praksis ‘amaliyah pembebasan itu sendiri.

Konsep di atas boleh disebut *Islam Taharruri*, Islam yang membebaskan manusia dari kegelapan kepada terang, dari kedzaliman pada keadilan. Suatu jalan berislam yang memusatkan perhatian pada persoalan keumatan, kerakyatan dan kemanusiaan yang secara akut

menghimpit lapisan besar masyarakat banyak. Dimulai dari yang paling kongkret, persoalan ekonomi, sosial, lingkungan, politik sampai ke aspek budaya yang halus dan spiritual.

Mungkin ada yang bertanya; kenapa tidak dari menanamkan iman? Jawabnya sederhana. Sebelum manusia lahir di dunia, ketika masih ada dalam kandungan ibunya, iman sudah ada di dalam hatinya. *Âlastu birabbikum? Qâlû balâ* (Apakah kamu percaya bahwa Aku Tuhanmu?, tanya Allah kepada setiap kita ketika masih janin. Kita menjawab, “Betul Engkau adalah Tuhanmu” (QS al-A’raf: 172).

Misi meneguhkan keimanan manusia tidak lain adalah tugas membebaskan manusia dari belenggu kehidupan yang dapat melumpuhkan iman itu: yakni kebodohan dan kefakiran. Membebaskan manusia dari kebodohan mensyaratkan pendidikan yang mencerdaskan, yang ditopang oleh kesehatan dan kecukupan gizi, serta tingkat kehidupan ekonomi (sarana) yang berkelanjutan. Barangkali inilah rahasia sabda Rasulullah SAW, “*kadal faqr an yakuna kufra!*” (hampir saja kefakiran menjadi kekufuran)!

Memang tiga aspek (ekonomi, kesehatan, keterdidikan), ibarat lingkaran tunggal yang tidak jelas dari mana titik mulanya. Akan tetapi, fakta bahwa sebelum manusia tumbuh sehat dan terdidik, Allah sudah menyediakan bumi yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan material (ekonomi) untuk menopang kehidupan umat manusia. Maka problem kemiskinan yang dialami sebagian umat manusia, tidak lain adalah problem distribusi, di mana sebagian orang mengambil atau mendapatkan terlalu banyak dengan akibat sebagian manusia yang lain

tidak *kebagian* apa yang menjadi haknya. Kita menyebutnya problem ketidakadilan.

Kepedulian terhadap problem ekonomi sesama inilah, yang oleh al-Quran dijadikan sebagai parameter otentik keberagamaan kita. "Tahukan kalian siapa yang mendustakan agama? Dialah (pribadi, organisasi, lembaga, atau bahkan negara) yang tidak peduli dengan anak yatim dan persoalan pangan (ekonomi) bagi orang-orang miskin" (QS. al-Mâ'un: 1-3).

Bertolak dari problem ketidakadilan menyeluruh yang diawali dari ketidakadilan ekonomi, Islam sebetulnya memiliki solusi, yaitu zakat, di mana yang memiliki kemampuan ekonomi lebih harus menanggung saudaranya yang kekurangan. Lebih dari sekedar ajaran sedekah karitatif yang tidak berdampak, zakat pada dasarnya adalah konsep etika sosial dan politik kenegaraan untuk keadilan. Pada tataran praktis, zakat adalah konsep perpajakan (*akhdzu*) dan pembelanjaan (*tasharruf*) yang ada pada kewenangan negara untuk redistribusi pendapatan agar kesejahteraan tidak hanya berputar di tangan orang-orang kaya saja. *Kaila yakuuna dulatan bainal aghniya-a minkum* (QS. al-Hasyr: 9).

Ashanaf delapan—yaitu mereka yang berhak mendapatkan zakat (*mustahiq*)—adalah acuan etik penyusunan anggaran belanja negara, di pusat maupun daerah, dengan pemihakan yang begitu jelas dan terukur kepada kepentingan masyarakat luas, terutama yang lemah.

Mewujudkan Indonesia sebagai negara kebanggaan dunia Islam adalah tanggung jawab besar umat Islam Indonesia. Tanggung jawab ini hanya bisa diwujudkan, bukan terutama dengan aktif memperebutkan

kekuasaan – apalagi dengan “menjual murah” – lebih untuk kepentingan pribadi. Tapi dengan memajukan tingkat keterdidikan, kecerdasan dan kesejahteraan umat dan bangsanya.

Untuk itu, NU harus kembali dan *istiqomah* pada cita-cita awal dan sekaligus jatidirinya, yakni sebagai wadah keulamaan untuk memuliakan Islam dan umat manusia. Dan inti keulamaan sebagai esensi ke-NU-an, adalah wawasan keilmuan dan moralitas dalam amal perkhidmatan nyata yang berkualitas untuk umat dan bangsanya. Inilah amanat suci para pendiri NU, yang tidak akan pernah mendapatkan prioritas utama, selagi para pemimpin NU terdiri dari para politisi yang hanya peduli untuk menyapa warganya hanya untuk mobilisasi dukungan politik belaka.

Peran agamawan seperti ulama sangat penting dalam memperhatikan persoalan riil masyarakat. NU harus turun ke bumi untuk membincangkan dan mengurus persoalan seperti pangan, energi, dan hal-hal konkret lainnya. Karena sesungguhnya, dalam sebuah hadits dikatakan, manusia bersekutu dalam tiga hal, yaitu air (*al-ma'*), ‘sumber daya pangan’ (*al-kala'*), dan energi (*an-nar*).

Tafsir tiga hal itu—dalam konteks kekinian—adalah kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik dan sebagainya. Oleh karena itu, tiga hal ini harus bisa diakses secara merata oleh warga masyarakat, yang dicukupi dari anggaran belanja negara.

Ironisnya, sekarang ini hampir di semua level nasional, alokasi anggaran rutin bisa mencapai 70 persen. Itu pun kadang ada yang tidak masuk akal dan menyinggung rasa keadilan masyarakat banyak. Sehingga bisa dibilang, ini adalah korupsi yang dilegalikan. Padahal, dalam pandangan Islam, secara teologi dana yang di APBN dan APBD itu adalah

uangnya Allah tapi untuk rakyat, terutama rakyat yang lemah. Ini penting sekali dipahami, karena bila setiap penganggaran yang mengalokasikan uang publik justru memberikan porsi lebih besar kepada pejabat, maka itu adalah korupsi kendati secara formal diundangkan.

Juga dalam pandangan fikih, korupsi diukur tidak semata sesuai anggaran atau tidak, tapi justru anggaran itu ditelaah secara kritis apakah sudah memihak rakyat banyak atau belum. Di sinilah peran tokoh keagamaan, yakni melakukan *ethical review* terhadap anggaran itu, bukan dari undang-undang yang lebih tinggi, namun berdasarkan sisi kerakyatannya.

Peran Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting pada domain ini—melakukan advokasi, mendampingi umat mengakses layanan publik dan memberi kontrol kepada *umara* (pemerintah) yang ada. Gerakan yang diusung oleh Nahdliyyin Center Kota Pekalongan merupakan salah satu inovasi untuk mengembalikan NU menjadi “pejuang rakyat” yang sesungguhnya. Yaitu sebuah gerakan yang langsung bersentuhan dengan umat kaum *mustadl'afin*.

Kerja NU sesungguhnya adalah kerja sosial yang tidak bisa dilakukan secara individual. Tapi kerja yang harus dilakukan secara kolektif (*jama'ah*), yaitu membimbing umat dalam berbangsa, bernegara, membangun ekonomi umat, kesehatan dan pendidikan. Satu hal yang harus dipahami, keberadaan *jam'iyyah* (organisasi) hanya mungkin bila ada warga (*jama'ah*). Warga adalah salah satu dari sendi *jam'iyyah* selain *imam* (pengurus), tujuan bersama, dan aturan main.

Sayangnya, *jama'ah* oleh sebagian orang dipahami secara terbatas, yaitu semata *jama'ah* shalat. Padahal sesungguhnya, *jama'ah* adalah

terorganisir. Ibarat shalat *berjama'ah*, shalat yang terorganisir, harus terpenuhi adalah imam, makmum, aturan atau tata cara shalat, dan tujuan bersama. Imam adalah pengurus, sementara makmum adalah *jama'ahnya*. Oleh karena itu, sesungguhnya masjid adalah miniatur organisasi. Organisasi adalah masjid virtual. Dengan organisasi, kita '*menjama'ahkan*' amal shaleh demi tujuan bersama organisasi.

Dengan demikian, penguatan organisasi itu meniscayakan adanya pengorbanan, tidak hanya harta (*bi amwal*), tapi juga mengorbankan egoisme (*bi anfus*). Sehingga yang diperlukan adalah mengubur egoisme (*ananiyyah*) dan menggantikannya dengan ke-kita-an (*nahnuniyyah*). Modal dasar organisasi adalah mengikhaskan egoisme.

Dalam buku ini, Anda akan menjumpai proses pembentukan *community center*, pusat warga berkumpul untuk mengadvokasi diri. Secara khusus, di Kota Pekalongan, *community center* itu menjelma menjadi Nahdliyyin Center (NC). Kiprah para relawan NC membuktikan, *nahnuniyyah* (kekitaan) sudah menjadi ruh perjuangan NU. Karakter dan semangat itu yang agaknya harus kita tauladani.

Buku yang akan Anda baca ini merupakan kisah sukses kaum Nahdliyyin yang mencoba menerjemahkan pesan para *masyayikh* pendiri NU, yang sejak awal ingin *jam'iyyah* ini tetap ada di garis perjuangan keumatan. Semoga pengalaman kaum Nahdliyyin di Kota Batik ini mampu menginspirasi Nahdliyyin di tempat lain untuk membuat gerakan yang inovatif.[]



The Asia Foundation

Benchmark bagi Prakarsa Pembentukan Community Center

John Brownlee

Direktur Program Islam and Development The Asia Foundation

SEJAK memulai program advokasi anggaran *pro-poor*, yang lebih dikenal dengan Prakarsa Rakyat Sipil untuk Pengentasan Kemiskinan (*Civil Society Initiative against Poverty - CSIAP*), Asia Foundation mulai mendukung upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis ormas-ormas Islam dalam hal kebijakan penganggaran dan pembuatan kebijakan daerah.

Ini menjadi tujuan yang strategis dan penting mengingat ormas Islam memiliki jaringan luas, kredibilitas, serta jumlah konstituen yang besar, yang sebagian juga warga miskin. Lagi pula, keadilan sosial merupakan satu ideal yang cukup sentral dalam agama Islam, dan karena itu pengentasan kemiskinan sering diangkat sebagai salah satu amanah oleh organisasi Muslim.

Program CSIAP sudah berjalan sejak 2005, dan pada umumnya bisa dibagikan ke dalam dua fase. Fase pertama (2005-2008) bisa dikatakan merupakan tahap ketika advokasi anggaran yang *pro-poor* masih mencari bentuk. Pada tahap yang penting ini, pembentukan Nahdliyyin Center (NC) yang digagas oleh teman-teman PATTIRO Pekalongan dan para anak

muda NU di kota ini bisa dikatakan sebagai sebuah *benchmark* bagi prakarsa-prakarsa pembentukan *community center* di tempat-tempat lain, baik ormas-ormas NU maupun non-NU. Pelembagaan dan penguatan NC yang sampai merambah di aras kecamatan dan kelurahan, pada CSIAP 2 (2008-2011) banyak menjadi rujukan bagi ormas dan LSM mitra Asia Foundation sehingga tidak ada proses pengulangan, *reinventing the wheel*.

Melalui penulisan buku ini kami berharap agar para pembaca, khususnya dari kalangan ormas Islam dan pegiat advokasi bisa belajar beberapa hal penting: Pertama, kesabaran para penggagas awal untuk bisa masuk ke dalam jaringan ‘elit’ NU termasuk menularkan falsafah kebijakan publik dan penganggaran yang *pro-poor* dalam forum-forum tradisional NU. Kedua, konsistensi dalam membumikan NC sampai ke aras kelurahan dan semangat *voluntarism* yang tidak bergantung kepada pihak lain (baca: lembaga donor). Ketiga, menggabungkan antara diskursus-diskursus perbaikan layanan publik untuk kaum miskin dengan realisasi kegiatan-kegiatan yang aktual dan sinergis dengan program pemerintah daerah.

Akhirnya, The Asia Foundation mengucapkan selamat kepada penulis yang telah bekerja keras hingga terselesaikannya buku ini. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada United Kingdom *Department for International Development (DfID)* yang telah mendukung program-program advokasi anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan selamat membaca! []

Sekapur Sirih Penulis

"Setelah era politik parpol-parpol yang berebut kekuasaan, disusul oleh kekuasaan kaum profesional dan kemudian tentara/militer selama tigapuluhan tahun lebih, kini datanglah era untuk menyaksikan munculnya peranan lembaga-lembaga keagamaan (seperti ulama dan sebagainya).

----- **KH Abdurrahman Wahid**, "Tahan Berpolitikkah Pondok Pesantren?", www.gusdur.net, 5 Oktober 2005

NAHDLATUL Ulama memiliki pengikut yang sangat banyak di Indonesia. Secara kultural, NU menjadi organisasi keagamaan terbesar di negeri ini. Potensinya besar, selain jumlah anggota yang banyak, juga fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah. Lembaga dan badan otonomnya juga menyumbangkan peran untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam kutipan di atas, mantan Ketua PBNU KH Abdurrahman Wahid—yang baru menutup mata pada 30 Desember 2009 lalu—menyiratkan munculnya peran lebih dari NU usai reformasi bergulir. Dan, NU tampaknya terus berusaha merealisasikan harapan itu. Salah satunya adalah di Kota Pekalongan, dengan membentuk Nahdliyyin Center.

Pekalongan, sebuah kota pesisir utara di Jawa Tengah. Mayoritas penduduknya warga NU, dan terkenal dengan julukan Kota Batik. Persoalan sosial di kota itu juga cukup kompleks, dan NU telah memprakarsai pembentukan *community center*—yang dinamai Nahdliyyin Center—sebagai bagian tidak terpisahkan dalam strukturnya. Posisinya sebagai tim kerja tetap.

Inisiatif kepengurusan NU Kota Pekalongan periode 2007-2012 yang diketuai H Ahmad Rofiq ini, layak ditiru oleh ormas Islam yang lain—khususnya organisasi NU di daerah lain. Potensi anggota, jaringan, akses dan fasilitas infrastruktur ormas Islam menjadi penopang suksesnya pembentukan “lembaga pelayan masyarakat” ini.

Buku ini akan memapar penjelasan tentang *community center*, yang keberadaannya niscaya, saat regulasi tentang keterbukaan informasi publik ditetapkan melalui UU No 14 tahun 2008. Dilanjutkan pengalaman Nahdliyyin Center dalam mengokohkan bangunan organisasinya. Termasuk kisah sukses para relawan NC dalam advokasi kesehatan, pendidikan dan kesehatan.

Pengalaman NC adalah manifestasi penjelasan arti Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*. Agama yang menyokong pembangunan dan pemberdayaan rakyat. KH Abdurrahman Wahid pernah menulis dalam majalah *Tempo* edisi 1 Juli 1978, “Sebenarnya para agamawan sendiri dapat memperjelas arti agama bagi pembangunan kepada rakyat, jika mereka mau memperhatikan sungguh-sungguh persoalan-persoalan pokok yang dihadapi oleh pembangunan itu sendiri. Perhatian itu sudah tentu harus dimulai dari pemahaman yang benar akan keadaan yang dialami oleh mayoritas bangsa dewasa ini.”

Semoga Nahdliyyin Center menjadi salah satu tafsir pemahaman yang benar atas kondisi negara yang masih banyak dihuni warga miskin ini. Selamat membaca. []

BAB I

COMMUNITY CENTER UNTUK LEBIH BERDAYA

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

--- *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1*

Terbukanya Keran Partisipasi

TAHUN 1998 adalah awal reformasi. Pada saat itu, terhapus pula larangan terhadap partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Kebebasan berkumpul dan berbicara makin mendorong warga yang terorganisir untuk memainkan peran lebih penting dalam kehidupan publik.

Pada ruang inilah, warga memiliki kesempatan mengorganisir diri. Penyebaran demokrasi membuka kesempatan baru bagi warga negara untuk berpartisipasi memperkenalkan institusi dan mekanisme akuntabilitas dalam negara yang sebelumnya tidak menyokong keterlibatan warga.

Seiring dengan meningkatnya kebebasan bereksresi dan berkumpul, muncul dan berkembanglah berbagai gagasan dan aktor sosial baru. Warga negara yang sebelumnya ditolak berpartisipasi, kini mencoba lebih terlibat. Untuk mengimbangi hal ini, para pejabat daerah juga telah mulai membuka pintu bagi masukan dari warga dan perkumpulan warga. Saat itulah, keran partisipasi lebih terbuka lebar.

Salah satu bentuk keterbukaan itu adalah, warga berhak berpartisipasi dalam siklus perencanaan pembangunan, melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang diselenggarakan pemerintah. Berdasar UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang adalah langkah pertama dalam perencanaan partisipatif dan siklus anggaran yang memungkinkan warga membuat prioritas kebutuhan mereka lewat pertemuan Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Beberapa pemerintah daerah juga telah menetapkan Perda yang memungkinkan transparansi dan partisipasi warga dikonsultasikan dalam proses pembuatan kebijakan. Meskipun partisipasi warga tidak bisa sepenuhnya diatur undang-undang, setidaknya Perda tranparansi memberi perlindungan hukum dan dorongan bagi warga untuk terlibat. Perda ini juga menjamin akses terhadap informasi tertentu di daerah.

Dalam kondisi negara yang makin terbuka, warga negara bisa menegakkan haknya dalam mengakses informasi dan layanan publik. Warga berkumpul dan berserikat dalam sebuah forum. Kekuatan itu muncul dan menguat melalui pembentukan *community center*.

Community Center, Apa dan Mengapa?

Warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang prima dari pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Jika terdapat kekurangan, keterlambatan atau penyelewengan, maka warga berhak untuk melakukan komplain. Melalui *community center* (majelis warga) itulah yang menjadi wadahnya. Dari pengaduan, warga berinisiatif untuk memediasi diri mendapatkan hak mereka.

Community center menjadi salah satu upaya penguatan upaya partisipasi tersebut. Kesadaran kolektif untuk membela hak sendiri melalui perkumpulan itu berkembang di berbagai daerah. Dorongan muncul dari dalam setelah bertemu di berbagai forum kultural. Warga di Kota Semarang, Kota Tangerang, Kota Pekalongan dan Kota Malang, sudah melakukan hal tersebut. Serupa juga gerakan warga di Jeneponto dan Bantaeng di Sulawesi Selatan.

Gagasan *community center* ini cukup sederhana, yakni menjadi wadah atau pusat pengaduan bagi masyarakat yang tidak puas atas pelayanan dasar. Misalnya pelayanan kesehatan oleh Puskesmas maupun pelayanan pendidikan dasar, yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan.

Melalui *community center*, warga yang memiliki keluhan yang sama terhadap suatu pelayanan publik bisa melakukan complain secara bersama. *Community center* juga menjadi wahana bagi warga yang belum berani menyampaikan complain secara terbuka tapi menghendaki penyelesaian masalahnya.

Pembentukan pusat pengaduan bagi warga di beberapa desa/kelurahan di daerah, berangkat dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dalam diskusi-diskusi yang kebanyakan melibatkan keluarga miskin, warga melakukan identifikasi terhadap kondisi pelayanan publik yang diterima. Dari diskusi itu, muncul pernyataan warga yang merasa mengalami kesulitan, bahkan ketidakjelasan dalam menyampaikan pengaduan, sehingga mengakibatkan banyak warga enggan melakukan complain meskipun mendapatkan layanan tidak baik.

Bahkan ada juga di antara warga yang tidak mengetahui mekanisme akses terhadap layanan dasar tersebut, termasuk prosedur dan mekanismenya. Hal ini disebabkan, selain karena kurangnya tingkat pendidikan, juga karena aparatur pemerintah tidak gencar dalam melakukan sosialisasi.

Dalam pusat informasi warga itu, mereka bisa berperan menjadi wadah akumulasi dan saluran komplain. Selain itu, juga diharapkan bisa berperan sebagai wadah pembelajaran untuk mengakses layanan dasar dari pemerintah.

Pada tahap berikutnya, *community center* sudah masuk pada ranah evaluasi pembangunan. Keterlibatan pegiatnya dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Partisipasi dan kontrol masyarakat untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan tanpa penyimpangan.

Bahkan, *community center* saat ini juga sudah menjelma menjadi pelaksana kebijakan pemerintah, selain sebagai sasaran. Evolusi ini terjadi berkat sinergi yang baik antara warga yang kritis dan pemerintah yang bijak.

Pada kenyataannya, kesadaran kebanyakan warga untuk berpartisipasi dan mengontrol proses perencanaan dan penganggaran masih rendah. Sebagian besar warga masih beranggapan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka.

Oleh karena itu, melalui *community center*, warga juga bisa disadarkan bahwa sesungguhnya proses perencanaan dan penganggaran

pembangunan bisa sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, apabila pada APBD sebuah daerah hanya menganggarkan dana yang kecil untuk pelayanan jaminan kesehatan di rumah sakit maka masyarakat miskin harus bersiap dipungut biaya yang tinggi ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah.

Banyak komunitas warga telah berhasil melobi pemerintah untuk alokasi dana lebih besar bagi sektor pendidikan, perawatan kesehatan bagi kaum miskin, dan penganggaran yang lebih peka gender. Bergeser dari pola lama yang mengedepankan demonstrasi, kelompok warga kini terlibat dengan badan pemerintah dalam konsultasi publik, dengar pendapat anggaran dan gugus tugas antar pemangku kepentingan melalui *community center*. Dengan keterampilan berorganisasi dan advokasi yang baru, koalisi warga makin memperoleh kepercayaan dari pejabat pemerintah yang responsif.

Keterlibatan masyarakat warga dalam penerapan kerja anggaran (termasuk analisis, advokasi, dan transparansi anggaran) dapat menjadi cara yang kuat untuk memaksa pemerintah menjadi akuntabel sekaligus mengenalkan kebijakan pemberian bantuan bagi kaum yang kurang beruntung. Melibatkan dan mengorganisasikan warga melalui *community center*, benar-benar bisa memaksa pemerintah untuk lebih akuntabel mengenai praktek pengeluaran mereka. Rembug warga (*town-hall meetings*) dan kebangkitan kembali tradisi pertemuan warga untuk membangun konsensus, menjadi forum pelibatan konstruktif warga dan pemerintah.

Lima peran *community center* adalah sebagai berikut. **Pertama**, sebagai pusat informasi bagi masyarakat. *Community center* yang terbentuk dengan kesadaran akan pentingnya informasi ini, diharapkan dapat berperan dalam mengupayakan akses informasi yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan perempuan. Informasi tersebut dapat berupa informasi yang berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat, baik sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh, pelajar maupun yang terkait dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya.

Untuk menjalankan fungsi ini, *community center* mengupayakan untuk mencari, meminta dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari berbagai badan publik atau dinas setempat, dari sumber-sumber informasi dan media yang tersedia, maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Kemudian, *community center* akan mengemas informasi tersebut agar mudah dimengerti, menarik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan atau menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat, baik secara langsung melalui pertemuan warga maupun melalui media selebaran, radio, papan pengumuman, media komunitas maupun melalui pemanfaatan teknologi internet.

Kedua, *community center* difungsikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dimana masyarakat dapat berkumpul, berbincang dan mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi untuk kemudian membuat aktivitas-aktivitas bersama guna mengatasi persoalan tersebut.

Sebagai contoh, dalam kegiatan bersama ini akan terjadi saling tukar pengalaman tentang bagaimana cara memanfaatkan layanan dan program-program dari pemerintah. Misalnya bagaimana cara mengurus dan mendapatkan Askeskin/Jamkesmas; siapa saja yang berhak mendapatkan Jamkesmas, BLT dan BOS, berapa rupiah yang bisa diterima, dan harus kemana mengurusnya; bagaimana cara membuat proposal untuk mendapatkan dana bergulir dari APBD; dan sebagainya.

Ketiga, *community center* juga dapat berperan sebagai pendamping masyarakat, baik dalam memanfaatkan program dan layanan dari pemerintah, maupun dalam melakukan pemberdayaan dan penguatan masyarakat.

Keempat, *community center* difungsikan sebagai mediator yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah setempat. *Community center* menjadi jembatan aspirasi komunitas masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah. Begitupun sebaliknya, *community center* dapat dimanfaatkan pemerintah daerah setempat untuk menyampaikan program-program pemerintah yang sedang dilakukan.

Kelima, *community center* sebagai wadah yang solid bagi masyarakat untuk melakukan advokasi guna mengupayakan perubahan kebijakan. Sebagai contoh adalah advokasi untuk mendorong kebebasan informasi di daerah (penerapan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), maupun dalam upaya mendorong adanya aturan tentang keterbukaan informasi berupa peraturan daerah (Perda) dan upaya untuk mendorong terbentuknya komisi informasi di tingkat kabupaten.

Membentuk *Community Center*

PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) di berbagai daerah telah menginspirasi dan menginisiasi pembentukan *community center* di wilayah masing-masing. Selama satu dasawarsa PATTIRO berdiri, ditemukan tiga pola dalam pembentukan *community center*. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan.

Pola **pertama**, adalah pembentukan oleh mitra lokal yang sudah berdiri sebelumnya, lalu diformalisasi menjadi *community center*. Mereka sudah mengorganisir diri dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat atau perkumpulan profesi, seperti kelompok tani. Proses intervensi berjalan setelah diskusi intensif dengan lembaga tersebut.

Pola **kedua** adalah membentuk *community center* yang sama sekali baru. PATTIRO menginisiasi pembentukan *community center* dengan pendekatan mulai dari tokoh kunci (*key person*), lalu dilanjutkan diskusi terfokus, hingga pembentukan *community center*. Ini terjadi di Lebak dan Serang, Banten.

Pembentukan *community center* melalui *indepth interview* sekaligus mencari *key person*. Setelah didapat nama-namanya, lalu diundang untuk ikut dalam diskusi warga. Dilanjutkan dengan acara workshop pembentukan *community center* dengan tujuan untuk memahamkan fungsi, peran, urgensi dari *community center*. Berikutnya dilakukan pelembagaan formal dengan struktur kepengurusan. Pemilihan secara demokratis dan langsung di forum workshop.

Pola **ketiga** adalah “mencangkokkan” *community center* kepada ormas besar yang sudah mapan. Pola inilah yang terjadi pada Nahdliyyin

Center Pekalongan yang merupakan jelmaan *community center* yang menjadi bagian integral dari struktur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Pekalongan.

Proses pembentukan dalam tiga pola itu hampir sama, diawali dengan berkumpulnya warga, lalu diskusi pemetaan masalah tentang layanan publik di daerah setempat. Berikutnya pembentukan program kerja dalam rentang waktu tertentu diiringi penunjukan siapa yang bertanggungjawab. Hal yang membedakan pada proses tumbuh kembang *community center* ini adalah pada sustainibilitas atau keberlanjutan.



HALAQAH – Pegiat Nahdliyyin Center melakukan *halaqah* rutin untuk membahas program kerja. Peran *community center* seperti NC sangat signifikan untuk perbaikan pelayanan publik.

Inisiatif tidak selalu muncul dan minat untuk mengadvokasi komunitas sendiri membutuhkan topangan struktur, baik formal maupun informal. Dalam posisi inilah, pola ketiga, yaitu pembentukan *community center* dengan “mencangkok” pada sebuah ormas mapan seperti NC, mendapat keuntungan. Struktur NU yang sudah tersebar di 47 kelurahan seluruh Kota Pekalongan sangat memudahkan proses konsolidasi, koordinasi dan tentu kebermanfaatan dari *community center* tersebut.

Pelayanan Publik di Kota Batik

Slogan kota ini sesuai dengan komoditas yang banyak diproduksi di sana, yaitu Kota Batik. Sebagaimana teritori lain pada masa Soeharto, semua harus memiliki slogan, maka jadilah BATIK dengan akronim Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif.

Kota Pekalongan mendapat banyak pujian atas inisiatifnya memperbaiki birokrasi. Visi yang sering disampaikan kepada publik tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, telah menampakkan hasil. Berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional yang berkait dengan penataan kawasan kumuh dan kesehatan lingkungan kota juga telah diperoleh.

Wali Kota Pekalongan dr. H Basir Ahmad, telah mencanangkan dan menjalankan program pemukiman perkotaan yang aman dan layak huni. Targetnya tak main-main yaitu, menjadikan Kota Pekalongan bebas rumah tidak layak huni pada tahun 2008 dan bebas kawasan kumuh pada tahun 2010.

Kota Pekalongan yang memiliki pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 4 persen per tahun, sebenarnya secara

umum bisa dikatakan sebagai daerah makmur. Sektor penyumbang utama PDRB ini adalah industri besar dan sedang, serta perdagangan besar dan eceran. Dua produk unggulan kota ini, yaitu tekstil dan perikanan, telah menyumbang nilai ekspor sekitar US \$ 2,02 juta pada 2005. Bahkan di kota yang terkenal dengan makanan khas Sego Megono ini, terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang menjadi infrastruktur pendukung utama industri perikanan.

Kota dengan penduduk lebih dari 260 ribu jiwa ini, 78.938 jiwa di antaranya tercatat sebagai penduduk miskin. Artinya hampir mencapai 30 persen penduduk. Sebagai kawasan perkotaan, Kota Pekalongan adalah salah satu sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Pada 1999/2000 dianggarkan dana Rp 2 miliar untuk delapan kelurahan yang berpenduduk minimal 7.500 jiwa. Selanjutnya pada 2002/2003 dianggarkan Rp 2,95 miliar.

Sasaran P2KP adalah 21 kelurahan dengan minimal penduduk 4.000 jiwa. Dengan kata lain, program penanggulangan kemiskinan yang didanai P2KP sebenarnya telah mencakup separuh kelurahan di Kota Pekalongan. Dengan kondisi ini terlihat kemiskinan masyarakat pekalongan di tengah pertumbuhan ekonominya.

Catatan penting prestasi pemerintah Kota Pekalongan yang lain adalah program pembangunan perumahan warga miskin. Dengan mengoptimalkan dana dari Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera), Wali Kota Pekalongan berhasil memperluas target program rumah aman, dari 400 buah menjadi 1.000 rumah.

Pemkot Pekalongan memberikan bantuan untuk plesterisasi, pembangunan jamban, dan pembuatan sumur gali. Sistem bantuan untuk

rumah aman bagi komunitas miskin dijalankan dengan dua skema untuk dua kelompok sasaran. Bagi keluarga miskin yang produktif—yaitu yang punya usaha produktif—Pemkot memberikan dana stimulan dalam bentuk kredit lunak dengan bunga 6 %.

Untuk keluarga miskin yang tidak produktif, diberikan dana dalam bentuk hibah. Program untuk keluarga miskin produktif didanai dari program rumah swadaya yang berasal dari Menpera. Bantuan hibah bagi keluarga miskin tak produktif didanai dari berbagai sumber: APBD provinsi, APBD Kota Pekalongan, P2KP (DPU) dan KUBE (Depso). Dalam waktu empat bulan di tahun 2007, misalnya, Pemkot Pekalongan berhasil memugar 946 rumah dengan dana Rp 2 miliar dan membangun 50 rumah baru dengan dana Rp 500 juta.

Meski demikian, ternyata banyak persoalan dalam layanan masyarakat yang menjadi layak menjadi catatan. Ini yang akhirnya ditindaklanjuti oleh warga melalui *community center* yang mereka bentuk.

Salah satu masalah itu adalah layanan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang belum banyak dipahami warga miskin. Mereka tidak bisa memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan dari pemerintah secara maksimal, padahal itu hak mereka. Kondisi demikian terjadi karena proses birokrasi yang tidak dimengerti oleh warga miskin, dan itu membuat muncul rasa takut dan kadang salah dalam mengurus.

Sebelum terbentuknya Nahdliyyin Center pada 2007, di Kota Pekalongan terdapat masalah pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Belum terdapat komitmen secara terpadu yang diterapkan baik oleh rumah sakit atau unit kesehatan lainnya, meski Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM) diluncurkan. Kondisi ini

memunculkan kondisi tidak seimbang antara konsep dan komitmen lembaga. Keinginan pemerintah tidak tampak dalam kenyataan.

Hal ini diketahui dari masih adanya beberapa penolakan terhadap pasien warga miskin saat masuk ke rumah sakit dan pada saat pembelian obat oleh si miskin. Komitmen buruk juga dirasakan dari program kerja PT Askes yang—saat itu—dianggap tidak jelas arahnya.

Meski sudah memiliki kriteria kemiskinan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin penerima kartu Askeskin, ternyata masih banyak dijumpai ketidakpastian sasaran. Beberapa orang yang secara ekonomi mampu dan bukan termasuk golongan orang miskin, ternyata memiliki kartu Askeskin. Sebaliknya, ada sebagian masyarakat yang benar-benar miskin justru tidak menerima.

Masalah kesehatan ini terjadi karena informasi yang tidak tersampaikan secara lengkap kepada masyarakat. Selain belum ada itikad baik dari pemerintah sendiri. Inti persoalan layanan publik itu adalah tentang kondisi keterbukaan informasi dari badan publik di Kota Pekalongan. Kondisi ketidakterbukaan informasi banyak terjadi di sektor pelayanan publik mendasar, seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dan ekonomi.

Jikapun terjadi keterbukaan, tidak merata di semua SKPD. Misalnya di Dinas Kesehatan cukup terbuka, tetapi tidak demikian dengan beberapa aparat kelurahan. Ini menyebabkan kesenjangan informasi. Masyarakat tidak bisa mengakses, apalagi mendapat pelayanan maksimal.

Dari hasil pengamatan di lapangan mengenai kondisi layanan publik di Kota Pekalongan, maka dibentuklah *community center* di masing-masing kecamatan di Kota Pekalongan. *Community center* itu terdiri atas

komunitas warga miskin, petani, nelayan, pedagang, pencelup batik, dan kaum perempuan. Juga digawangi oleh buruh formal seperti yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Gagasan awal pembentukan *community center* di Kota Pekalongan adalah untuk melakukan advokasi dalam mendorong implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lokal masing-masing. Salah satu bentuknya adalah mendesakkan berdirinya institusi Komisi Informasi Daerah sebagai tangan panjang dari Komisi Informasi Pusat yang sudah dibentuk sebelumnya. Untuk itu secara berkala, diadakan pembekalan rutin untuk pegiat guna penguatan kapasitas (*capacity building*) *community center*.

Tujuannya adalah membangun kapasitas pegiat *community center* dalam melakukan advokasi kebijakan berupa implementasi keterbukaan informasi publik di sektor pelayanan dasar dan anggaran bagi masyarakat terutama untuk di Kota Pekalongan. Untuk itu PATTIRO Pekalongan mengadakan menggelar training khusus bagi pegiat *community center*. Salah satu yang intensif mendapat pendampingan dari PATTIRO—selama tiga tahun terakhir—adalah *community center* yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama.

NU sebagai Jembatan Kepentingan

Di Kota Pekalongan yang berkultur santri, mayoritas penduduknya berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Di wilayah inilah, *community center* yang dibentuk oleh PCNU—kemudian menjelma menjadi Nahdliyyin Center—akan memiliki peran sangat signifikan dalam advokasi kebijakan publik.

NU di Kota Pekalongan bisa menjadi jembatan kepentingan antara warga dengan pemerintah. Antara konsumen kebijakan dengan penyedia layanan publik. Masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang terjadi, bisa dijembatani oleh NU. Pemerintah tentu akan mendengarkan aspirasi dari ormas Islam terbesar di Kota Batik itu.

Wujud keterlibatan NU dalam mengadvokasi kebijakan publik adalah dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki NU. Potensi itu antara lain adalah kepengurusan NU hingga ke tingkat desa/kelurahan, jumlah kader dan simpatisan yang cukup besar dan tersebar, serta adanya tradisi-tradisi dalam NU yang bisa dimanfaatkan sebagai media advokasi.

Selain itu, keberadaan pengurus, kader, dan simpatisan NU di sebuah wilayah administrasi pemerintahan dapat didayagunakan untuk mengawal proses advokasi. Apalagi, biasanya seorang pengurus NU di sebuah wilayah adalah tokoh masyarakat setempat. Sehingga, mereka hampir selalu dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan. Mereka dapat mengawasi proses pelaksanaan forum tersebut dan mengawal hasil-hasil yang diputuskan.

Untuk menentukan sikap NU terhadap kebijakan publik tersebut ditentukan melalui tradisi-tradisi yang sudah lama berkembang di lingkungan NU yaitu *halaqah* (workshop) dan *bahtsul masa'il* (kajian mendalam).

Di kepengurusan PCNU Kota Pekalongan bersama para ulama dan pengasuh pondok pesantren, kedua tradisi tersebut mulai dimanfaatkan untuk membahas persoalan-persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

Salah satunya adalah *halaqah* dan *bahtsul masa'il* terkait masalah proses penganggaran APBD.

Advokasi kebijakan anggaran dimaknai sebagai sebuah tugas mulia melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* yang diajarkan dalam al-Quran, dan diyakini sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Tuhan.

Setidaknya, ada tiga alasan yang bisa dijadikan dasar mengapa NU harus terlibat aktif dalam advokasi umat atas kebijakan publik, sistem pelayanan pemerintah dan akses terhadap informasi. *Pertama*, NU relatif masih dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, NU harus menjaga kepercayaan tersebut dengan melakukan 'kerja peradaban' memberantas kemiskinan yang masih membelit sebagian besar warganya sendiri.

Kedua, NU relatif bisa diterima oleh pihak eksekutif dan legislatif. Posisi ini perlu dimanfaatkan untuk mengakses semua informasi dan dokumen tentang penganggaran, sebagai wahana sosialisasi sistem pelayanan yang belum merata, juga sebagai pihak yang membantu warga untuk mengakses pelayanan itu.

Ketiga, NU memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses perencanaan sampai tahap penetapan kebijakan anggaran. Posisi NU yang kritis dan bersedia bekerja mengadvokasi anggaran diharapkan bisa mengubah alokasi anggaran yang selama ini lebih diperuntukkan untuk kalangan birokrasi (belanja rutin) sehingga bisa direalokasikan untuk kepentingan rakyat miskin. Termasuk juga mendesakkan kepentingan warga miskin agar dibiayai oleh pemerintah Kota Pekalongan.[]

BAB II

SEJARAH NAHDLIYYIN CENTER

“Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah serta kegiatan perekonomian adalah masalah yang tidak dapat dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju sejahtera dan berakhlaq mulia .”
----***Naskah Khittah Nahdlatul Ulama 1984***

Pertemuan Dua Kegelisahan

NAHDLIYYIN adalah sebutan khusus bagi kaum muslimin yang berafiliasi kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Mereka tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia. Karena banyak jemaatnya, maka NU memiliki tanggungjawab moral dan sosial untuk mengawal kebijakan publik.

Sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia, NU mempunyai posisi yang sangat strategis di tengah masyarakat serta dalam kancah politik dan pemerintahan di negeri ini. Keputusan NU untuk kembali kepada Khittah NU 1926 yang dihasilkan pada Muktamar NU Situbondo tahun 1984 dinilai sebagai titik tolak bagi perkembangan dan dinamika baru dalam perjalanan NU.

Selama puluhan tahun sebelumnya, NU menjadi partai politik atau bagian dari partai politik, dan sejak keputusan tersebut NU dikembalikan kepada habitatnya yaitu dunia pendidikan, dakwah, pengembangan ekonomi, dan pelayanan masyarakat.



Oleh sebab itu, NU sangat berkepentingan dengan proses pembangunan, karena secara langsung atau tidak langsung dampak positif dan negatif pembangunan akan dirasakan oleh warga nahdliyyin. Apalagi harus diakui bahwa sebagian besar kaum nahdliyyin merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang akan menjadi subjek sekaligus objek pembangunan.

Islam sebagai *rohmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) juga menjadi landasan pertimbangan pembentukan NC.



Dalam bahasa KH Ahmad Marzuki, Ketua PC NU Kota Pekalongan periode 2005-2007, partisipasi masyarakat yang berjalan saat ini adalah “partisipasi daun salam,” hanya dibutuhkan saat memasak dan langsung dibuang begitu masakan matang. Begitu pula para pengambil kebijakan saat ‘mengolah’ partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat saat ini cenderung semu, kurang optimal bahkan sekadar formalitas.

Kesadaran akan fakta itulah yang mendorong beberapa anak muda NU Kota Pekalongan untuk merealisasi kemanfaatan NU secara nyata. Mereka antara lain adalah Abdul Basyir, Zaenal Muhibin, Aminudin Aziz dan H. Ahmad Rofiq. Saat itu, Abdul Basyir adalah juga Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Zaenal Muhibin adalah Ketua Gerakan Pemuda Ansor, H Ahmad Rofiq dalam posisi Wakil Bendahara PCNU, dan

Aminudin Aziz—selain merupakan kader NU—adalah Direktur PATTIRO Pekalongan. Secara kebetulan juga, Abdul Basyir dan Zaenal Muhibin adalah pegiat *community center* Kecamatan Pekalongan Barat yang didampingi oleh PATTIRO.

“Sudah cukup lelah NU hanya ‘dimanfaatkan’ untuk kepentingan-kepentingan politik. Sudah saatnya NU Pekalongan berbuat lebih nyata untuk warganya sendiri melalui program kerjanya,” ujar Zaenal Muhibin, yang kemudian menjadi Sekretaris Nahdliyyin Center.

Selain faktor keinginan untuk membawa NU netral secara politik, muncul juga harapan dari warga NU agar program-program NU menjadi lebih nyata, menukik, menyentuh kebutuhan, mengayomi, *ngedem-ngedemi* (menenangkan) dan *mbelani* (membela) warga Nahdliyyin yang notabene mayoritas di Kota Pekalongan.

Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan memiliki empat Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU [tingkat kecamatan] dan 47 Pengurus Ranting NU [tingkat kelurahan]. Berbagai program telah disusun, dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga nahdliyyin.

Akan tetapi, ternyata warga nahdliyyin belum merasakan kiprah pengurus secara langsung di semua tingkatan. Sehingga tidak heran jika masih banyak warga NU yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Hal ini tentu saja berdampak kepada ketidakmampuan orang tua menyekolahkan anaknya serta mendapatkan hak hidup sehat. Lalu, apa yang bisa dilakukan NU melihat kenyataan seperti itu?

Maka para pengurus NU merasa membutuhkan tim kerja yang menjadi ujung tombak organisasi NU beserta seluruh badan otonom, lembaga dan *lajnah* yang dimiliki NU. “Tapi tim kerja NU ini akan tampil

bukan sebagai ‘Robin Hood’ atau ‘Sinterklas’ yang membagi permen dan mainan, juga bukan sekedar forum diskusi,” kata Ketua Nahdliyyin Center, Abdul Basyir.

Pada titik kesadaran inilah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan menginisiasi terbentuknya Nahdliyyin Center, sebagai ikhtiar mengembalikan hak umat atas pelayanan *umara* (pemerintah).



SANTRI – Semangat generasi muda nahdliyyin. Jaya bukan hanya karena bendera, tapi berdaulat secara ekonomi.

Merangkul para *Masyayikh*

Selama rentang tahun 2007, para inisiator NC Kota Pekalongan, terus melakukan *roadshow* diskusi. Sejak Februari 2007, Basyir, Muhibin dan Aminudin *sowan* (menghadap) kepada para sesepuh (*masyayikh*) NU

di Kota Pekalongan untuk mendiskusikan tentang revitalisasi NU itu. Harapan mereka, program yang disusun NU pada kepengurusan periode berikutnya akan lebih mengakar dan terasa benar sampai kepada warga.

Tiga orang itu—ditambah H Ahmad Rofiq, yang kemudian menjadi Ketua PC NU Kota Pekalongan—akhirnya menjadi tim kecil perumus model gerakan untuk menjawab kegelisahan yang menggumpal, dan bagaimana menuntaskan harapan agar NU lebih baik. “Diskusi paling sering kami lakukan di kediaman H Rofiq. Selain itu, kami *sowan* kepada beberapa ulama, misalnya kepada KH Mushaffa Bakri, KH Zakaria Anshor dan KH Zaenuri,” papar Aminudin.

Inisiator NC itu menghabiskan banyak malam-malam untuk berbincang, menemui para kiyai dan sesepuh NU. Pada titik itulah, terjadi pertemuan berupa konsultasi teknis program antara pengurus NU dengan pegiat PATTIRO yang memiliki program penguatan ormas Islam dalam proses pembangunan daerah, melalui internalisasi kesadaran advokasi kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan kegiatan program advokasi anggaran, PATTIRO selalu melibatkan NU dan ormas Islam lainnya, di samping *community center* yang merupakan forum warga yang ada di empat kecamatan Kota Pekalongan yang dibentuk oleh PATTIRO.

Keterlibatan ormas Islam—terutama NU—baik itu dalam diskusi maupun workshop dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan masalah perencanaan dan penganggaran daerah, sangat membantu penguatan internal ormas Islam.

Di situlah, pertemuan kegelisahan antara aktivis NU yang berharap organisasinya lebih bermanfaat untuk jamaahnya, dengan pegiat

PATTIRO yang ingin membentuk masyarakat sipil yang lebih berdaya. Mereka bertemu di ruang perjuangan yang sama. Maka, mulailah digulirkan ide-ide cerdas itu.

Malam-malam Panjang

Implikasi dari kegiatan advokasi anggaran yang dilakukan oleh PATTIRO dengan pelibatan pengurus NU di Kota Pekalongan, adalah pada acara *lailatul ijtima'*. Pengurus Cabang NU Kota Pekalongan memasukkan materi-materi kebijakan publik ke dalam kegiatan pengajian itu. Misalnya, informasi tentang mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hingga hak-hak masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

Lailatul ijtima' adalah kegiatan rutin bulanan yang diselenggarakan Pengurus Cabang NU Kota Pekalongan. Biasanya, kegiatan tersebut hanya diisi pembacaan *tahlil*, *istighotsah*, dan ceramah agama. Meski awalnya sempat dipertanyakan oleh beberapa kiai di jajaran *syuriah*, masuknya materi-materi terkait dengan kebijakan publik dalam *lailatul ijtima'* mulai dirasakan manfaatnya dan bahkan dianggap sebagai kebutuhan.

Narasumber yang diundang berasal dari unsur legislatif dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu PATTIRO. Kegiatan yang selalu dihadiri pengurus PC NU hingga ranting itu pun menjadi media menanamkan nilai-nilai kewargaan (*civic values*) di kalangan pengurus NU. Dengan begitu, pengurus ormas Islam seperti NU diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin kenduri, tapi juga memelopori gerakan

antikemiskinan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik.

"Para kiai ada juga yang sempat menolak. Tetapi setelah dijelaskan, mereka hanya mengingatkan agar forum *lailatul ijtima'* tidak terkontaminasi kepentingan politik praktis," ujar Abdul Basyir, yang juga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan itu.

Kegiatan semacam itu, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pengurus ormas Islam mengenai pentingnya keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik. Dengan begitu, ormas Islam tidak terus-menerus berasib seperti "daun salam" yang hanya diperlukan sebagai penyedap masakan. Setelah masakan matang, daun salam pun langsung dibuang.

Demikianlah, malam panjang terus bergulir, dari diskusi, *halaqah* hingga *lailatul ijtima'*. Pengajian itu, lalu dilanjutkan di setiap ranting NU. Aminudin dan Sugiarto dari PATTIRO Pekalongan bersama para pegiat muda NU *blusukan* menelusuri kampung-kampung di Pekalongan untuk membuka cakrawala pikir kaum nahdliyyin tentang pentingnya advokasi kebijakan publik.

Di sisi yang lain, PATTIRO bersama masyarakat sipil—termasuk NU—terus melakukan upaya advokasi kepada pemerintah Kota Pekalongan agar mengeluarkan kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sebuah hasil mulai tampak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM). Perwal itu ditandatangani pada 15 Agustus 2007. Senyum bahagia mulai tersungging di wajah para pegiat itu.

Momentum Konfercab NU

Konferensi Cabang (Konfercab) adalah forum pengambilan kebijakan tertinggi bagi kepengurusan NU di tingkat kabupaten/kota. "Kami melihat itu sebagai suatu momentum strategis. Maka target kami, keberadaan Nahdliyyin Center bisa masuk menjadi program kepengurusan lima tahun ke depan," ujar Basyir.

Sebelum NC berdiri, sebetulnya NU juga sudah terlibat aktif dalam advokasi anggaran. Bersama 16 ormas Islam dan empat organisasi lainnya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan beserta badan otonom masing-masing, terlibat dalam pembentukan Forum Partisipasi Warga Kota Pekalongan atau disingkat Rupawan Kota Pekalongan. Forum itu berfungsi sebagai kanal partisipasi ormas Islam dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan musrenbang di Kota Pekalongan.

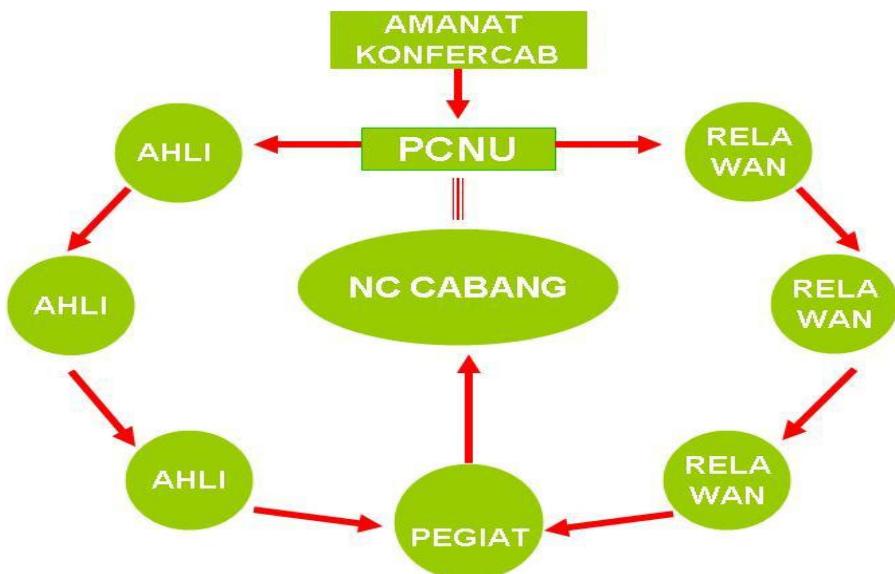
Namun, gagasan tentang NC bukan hanya untuk koalisi advokasi anggaran. NC adalah manifestasi kerja nyata dari pengurus NU. Maka, para inisiator NC kemudian berusaha terlibat aktif menjadi tim kerja (*organizing committee*) dalam Konfercab NU ke-XV Kota Pekalongan yang digelar pada 26-26 Oktober 2007 di SMP Salafiyah Kota Pekalongan.

Draf naskah Konfercab bertema "Dari NU untuk Bangsa, Menuju Kota Pekalongan yang Bersih dan Bermartabat" yang disiapkan panitia untuk peserta konferensi selesai disusun. Pada materi untuk Komisi C yaitu komisi perumus program kerja, akhirnya dicantumkan rencana pembentukan Nahdliyyin Center, dengan turunan kerja di empat bidang, yaitu pendidikan, dakwah, ekonomi dan kesehatan.

Rekomendasi dalam Konfercab itu salah satunya juga adalah mendorong agar Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kota. Bentuk nyatanya adalah mendesak agar Perwal P2KSBM segera diperdakan. Akhirnya, lahirlah Perda No 11 tahun 2008 tentang P2KSBM (Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat).

Perda itu memberi payung hukum bagi pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKSBM) yang sudah berjalan sebelumnya. Kepentingan NU terhadap advokasi kemiskinan berbasis perda itu adalah payung hukum yang mensinergikan aktivitas NC dengan program pemerintah.

"Dengan begitu, apa yang dilakukan NC akan beriringan dengan program pemerintah. Beberapa pegiat NC juga menjadi fasilitator kelurahan dari Program Akselerasi itu," ujar Basyir.



Mendapat Pengesahan Struktur

Pembentukan Nahdliyyin Center (NC) akhirnya menjadi mandat dari Konfercab NU bagi Pengurus Cabang NU Kota Pekalongan periode 2007 – 2012. NC dijadikan sebagai program unggulan kepengurusan periode itu.

Tiga bulan usai Konfercab, PCNU Kota Pekalongan menggelar Kajian Program Hasil Konfercab NU ke-XV pada 12-13 Januari 2008. Acara itu diadakan di Pagilaran Batang, diikuti oleh seluruh pengurus MWC NU, pengurus ranting dan badan otonom. Narasumber dan fasilitator yang hadir menjadi representasi dukungan dari seluruh pihak. Di antaranya adalah Habib Muhammad Lutfi bin Ali Yahya, KH Zakaria Anshori, KH Mushaffa Bakri dan Aminudin Aziz.

Salah satu agenda kajian program adalah membahas draf program kerja NC selama lima tahun ke depan. "Lembaga ini akan menjadi lembaga bantuan hukum, untuk mengadvokasi warga miskin yang tidak mendapatkan haknya," ujar Salahudin, Sekretaris PCNU Kota Pekalongan.

Dia berharap agar berdirinya NC menjadi titik kebangkitan NU di Pekalongan. "Apalagi banyak program NC yang bisa bersinergi dengan program pemerintah," ujar Salahudin yang ketika itu masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pekalongan.

Setelah mendapat kajian mendalam, akhirnya pada 5 April 2008, resmilah NC mendapat pengesahan dari struktur PCNU berupa Surat Keputusan. Dilengkapi dengan Pedoman Operasional NC Kota Pekalongan dan Pedoman Teknis NC Kota Pekalongan.



TAUSIYAH – Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, sesepuh kaum nahdliyyin Pekalongan, memberi tausiyah agar NU bisa memberikan yang terbaik untuk jamaahnya.

Pembentukan NC Kelurahan

Dari hasil kajian program, ditindaklanjuti oleh pengurus PC NU yang diberi mandat untuk realisasi pembentukan NC. Kepengurusan yang pertama dibentuk adalah di tingkat Kota Pekalongan.

Sebelum pembentukan NC di tingkat kecamatan dan tingkat ranting, Pengurus Cabang NU kota Pekalongan mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas calon pegiat Nahdliyyin Center yang difasilitasi oleh PATTIRO Pekalongan. Acara itu berlangsung selama tiga hari bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubarok Medono Pekalongan, pada

26-28 Februari 2008. Diikuti oleh 35 orang calon pegiat NC yang nantinya akan menjadi pegiat NC di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Setelah pembekalan pegiat calon NC selesai, dilanjutkan dengan pembentukan NC di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan, Pekalongan Utara. Ditambah satu ranting di Kelurahan Pabean sebagai daerah percontohan (*pilot project*).

Pola pembentukan di tingkat kelurahan sangat bergantung pada kesiapan pengurus ranting. Tidak ada instruksi yang mewajibkan pendirian. "Yang ada hanya imbauan. Jika mereka belum siap, maka perlu dipahamkan lagi. Bagi yang siap, akan langsung ditraining dan dilantik bersama kelurahan yang lain," papar Basyir.

Kendala dan Solusi

Diakui oleh pengurus NC Kota Pekalongan, bahwa masih terdapat berbagai kendala yang menghadang selama lebih dari dua tahun berdirinya NC. Kendala itu berasal dari internal maupun eksternal.

Kendala internal **pertama** adalah karena NC masih baru. Proses pengenalan NC hingga ke tingkat ranting membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Konsep tentang "sayap sosial" NU sebetulnya sudah inheren dalam *jam'iyyah* itu. Akan tetapi karena dimunculkan dengan nama baru, masih terdapat kegagasan penerimaan oleh warga NU di Kota Pekalongan.

Kedua, adanya persepsi yang masih berbeda terkait NC ini. Beberapa sesepuh NU ada yang awalnya menolak karena dianggap NC adalah organisasi baru dalam tubuh NU. Sementara badan otonom di bawah struktur sudah cukup mewakili. Kekhawatiran juga muncul dari

dalam, bahwa di masa depan eksistensi NC akan lebih nampak NU sebagai induk. Karena kerja-kerja NC langsung menyentuh masyarakat.

Persepsi ini dijawab oleh pengurus NC dengan cara tetap memposisikan pengurus NC dalam struktur PCNU Kota Pekalongan. Misalnya, Ketua NC Abdul Basyir juga adalah Wakil Ketua PCNU, dan Sekretaris NC Zaenal Muhibin juga menjadi Wakil Sekretaris PCNU. “Posisi kami adalah *ex-officio*, orang yang rangkap posisi. Ini untuk menjawab tuduhan bahwa NC akan lepas nantinya,” ujar Basyir.

Kekhawatiran lain adalah adanya tumpang tindih fungsi dari badan otonom NU dengan NC. Ini juga sudah dijawab dengan kesediaan koordinasi yang kontinyu. Diperkuat dengan struktur NC di semua ranting yang mewajibkan adalah unsur banom di dalam NC kelurahan.

Ketiga, tidak semua pengurus NC memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ini mempengaruhi etos kerja yang dibangun dalam NC yang berasas kerelawanhan. Untuk mengatasinya, digelar forum rutin oleh pengurus NU untuk menumbuhkan motivasi beramal. “Bukan hanya secara personal, tapi perlu juga landasan bahwa ini untuk kejayaan *jam'iyyah* Nahdlatul Ulama,” tegas Sekretaris NC, Zaenal Muhibin.

Selain internal, terdapat juga beberapa kendala yang berasal dari luar. **Pertama**, adanya kecurigaan dari masyarakat—bahkan dari dalam NU sendiri—bahwa NC akan dijadikan alat politik praktis dalam berbagai momentum Pemilu. Pada saat berdiri, NC dituduh alat kampanye Pilgub, juga saat pemilu legislatif dan presiden. “Tapi itu sudah kami bantah dengan tidak melakukan gerakan politik apapun. Apalagi, posisi saya sebagai anggota KPUD Kota Pekalongan, sudah merupakan jawaban

tersendiri. Mana mungkin saya sebagai wasit pemilu, ikut-ikutan menjadi pemain politik?" ujar Abdul Basyir.

Kedua, saat pertama kali berdiri, pegiat NC di beberapa kelurahan mengalami kesulitan saat mengakses data di kelurahan tersebut. Mereka dicurigai sebagai LSM pemeras yang sering merugikan aparat. Beberapa lurah bersikap apatis dan tidak merespon.

Untuk mengatasi hal ini, maka saat pelantikan NC tingkat kelurahan secara serentak, pada 23 Mei 2008, Pengurus NC Kota mengundang walikota dan berbagai dinas untuk hadir. Ternyata kehadiran Walikota Pekalongan, dr. Basyir Ahmad dalam pelantikan itu bisa menjadi alat ampuh untuk legalitas NC di mata aparat kelurahan.

Ketiga, setelah dua tahun berdiri, muncul persepsi di masyarakat, bahwa NC adalah "penyelesai semua masalah." Warga mengadukan masalah hukum, pemerintahan, akses terhadap layanan, penanganan ibu hamil, dan persoalan umum lainnya. Sementara itu, NC masih memiliki keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Akhirnya, kepada warga dijelaskan tentang fungsi NC sebagai fasilitator dan jembatan dengan pemerintah saja. Tentang alokasi dana bantuan kesehatan, misalnya, jumlahnya tidak bisa ditetapkan oleh NC.



JAS SOSIAL – Relawan NC mendapat jas hujan yang digunakan saat aksi-aksi kerelawanan.

Keberlanjutan Organisasi

Nahdliyyin Center sudah mapan secara struktur. Pengesahan resmi telah didapat, bahkan posisinya sebagai tim kerja tetap, menjadi jaminan bahwa tim ini akan tetap dibentuk pada Konfercab berikutnya.

Keberlanjutan organisasi, tergantung dengan program kerja yang terukur, ditambah ketersediaan dana bagi operasional lembaga. Pemerintah Kota Pekalongan mengucurkan dana Rp 25 juta pada dari dana hibah pada APBD 2009.

Satu hal yang patut dicatat adalah, NC tidak pernah meminta atau berinisiatif menyodorkan proposal. "Tiba-tiba saja, saya dihubungi oleh

beberapa anggota legislatif yang juga kader NU, diminta untuk menyerahkan proposal karena dana sudah disiapkan," ujar Basyir.

Bukan hanya uang, NC juga mendapat pinjaman mobil ambulan operasional dari pemerintah kota, yang kemudian digunakan dalam aksi pengobatan gratis dan donor darah. Keberadaan mobil itu dimanfaatkan secara maksimal melalui Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPK) NU. Maka, dengan dukungan dari pemerintah dan antusiasme warga nahdliyyin sendiri, NC optimis akan tetap berumur panjang.[]

BAB III

PROFIL NAHDLIYYIN CENTER

“Dengan demikian, moralitas yang harus ditumbuhkan haruslah memiliki watak utama yang berupa keterlibatan kepada perjuangan si miskin untuk memperoleh kehidupan yang layak dan penghargaan yang wajar atas hak-hak asasi mereka. Hanya dengan cara demikianlah derajat agama itu sendiri ditunjang oleh para pemeluknya.”

---- **KH Abdurrahman Wahid, “Moralitas: Keutuhan dan Keterlibatan,” *Tempo* 17 Juni 1978**

Siapakah Relawan NC?

Nahdliyyin Center menjadi pusat berkumpulnya warga NU. Di satu pihak mereka adalah warga yang mungkin mempunyai hambatan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan ataupun ekonomi, di pihak lain mereka juga adalah relawan NC yang siap membantu memberikan layanan untuk solusi bagi pemecahan masalah tersebut, baik berupa informasi, inisiasi maupun advokasi.

Para relawan NC sering menggelar diskusi. Dalam forum tersebut, tidak hanya terjadi diskusi biasa, namun juga evaluasi kerja, merumuskan rencana tindak lanjut (RTL), mekanisme kerja forum. Mulai dari berupa informasi, inisiasi sampai pada advokasi, sekaligus personil Penanggung Jawab (PJ) kerja dan standar operasionalnya.

Relawan NC adalah warga NU yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Mereka menyediakan diri setiap saat untuk memberikan informasi penting dan advokasi kepada warga mengenai prosedur mengakses layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan fasilitas lainnya. Mereka

sudah dilatih oleh NU bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya untuk menangani permasalahan warga di bidangnya masing-masing.

Posisi para relawan NC dalam struktur kepengurusan NU adalah sebagai *Tim Kerja Tetap* yaitu sebagai kepanjangan tangan NU, khusus untuk melakukan kerja-kerja pendampingan dalam rangka mengenalkan layanan-layanan publik, khususnya bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kepada warga. Kedudukannya menyatu di dalam program NU, bukan sebagai lembaga baru.

Tim Kerja NC bekerja di tingkat cabang sebagai koordinator tingkat kota. Tim kerja NC tingkat MWC sebagai koordinator tingkat Kecamatan dan Tim Kerja NC tingkat ranting bertanggungjawab di tingkat kelurahan.

Pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan berjumlah **sembilan** orang, sebagai koordinator, sekretaris, bendahara dan anggota dengan pembidangan masing-masing. Agar NC menjadi tanggungjawab semua, maka sembilan personel penggerak di tingkat kelurahan itu diambil secara merata dari seluruh banom NU, yaitu Muslimat, Fatayat, GP Ansor dan IPNU-IPPPNU.

Apa Tugas dan Fungsi NC?

Sesuai dengan kesepakatan para inisiatör NC yang didiskusikan bersama seluruh relawannya, disepakati bahwa Nahdliyyin Center memiliki dua tugas pokok yaitu:

1. Membantu Pengurus NU di masing-masing tingkatan dalam melaksanakan program-program kerja NU, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

2. Membantu Lembaga, *Lajnah* dan Badan Otonom di masing-masing tingkatan dalam melaksanakan program kerja, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, fungsi pokok Nahdliyyin Center adalah:

1. Pusat data (*database*) NU dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
2. Fasilitator bagi warga nahdliyyin yang berhubungan dengan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
3. Advokat atau pendamping terhadap setiap permasalahan warga, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
4. Pusat informasi setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5. Pusat penguatan SDM bagi warga nahdliyyin.

Selain itu relawan NC juga bertugas untuk memberikan informasi kepada warga, sampai pada memberikan advokasi ketika ada permasalahan pada warga berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dengan mengedepankan upaya *win-win solution*.

Mereka menjadi fasilitator, dinamisator, motivator, bahkan inspirator bagi warga. Juga menciptakan *network* dengan pihak-pihak lain yang dapat memberikan manfaat bagi warga. Menjalankan fungsi untuk mendayagunakan seluruh potensi yang tersebar di berbagai pihak.

Asrori, Membuat Layang-layang Kehidupan



PUKUL 03.00 WIB. Hari masih gelap, binatang malam juga masih mengerik keras. Hampir tak ada kehidupan yang tersisa di tengah lelapnya manusia. Tetapi tidak begitu bagi Asrori, relawan NC yang tinggal di Kelurahan Krapyak Kidul Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dini hari itu, pintu rumahnya diketuk. Bergegas lelaki tengah baya itu membuka pintu usai tergesa bangkit dari tempat tidur. Di depan pintu, tampak berdiri seorang lelaki dengan wajahnya cemas.

Asrori tanggap, segera dipersilakan masuk ke rumahnya yang sederhana. Ternyata lelaki itu adalah seorang suami,istrinya sedang di rumah sakit akan menjalani proses persalinan. Maksud kedatangannya di dini hari itu adalah untuk meminta pertolongan pengurusan agar kelahiran anak pertamanya bisa digratiskan. Dia mengaku pada Asrori, kondisi ekonominya sangat miskin dan tidak mampu membayar operasi caesar bagi persalinan istrinya.

“Ya, sebisa saya tolong. Setelah itu, saya dampingi dia untuk mencari surat keterangan miskin, lalu ke rumah sakit dan menyerahkan ke perawat. Hanya beberapa menit sebelum operasi,” ujar Asrori berkisah.

Dokter yang di dalam ruangan segera keluar setelah pintu diketuk perawat, menandatangani surat keterangan miskin itu. Akhirnya, ibu itu menjalani operasi persalinan yang biayanya mencapai Rp 6 juta dengan cuma-cuma. Biaya ditanggung oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui dana pendamping. “Saya sangat berbahagia bisa menolong sesama,” ujarnya.

Itulah salah satu kisah aksi kerelawan yang dilakukan oleh relawan Nahdliyyin Center. Pada prakteknya, sebuah *community center* yang menginduk pada ormas besar seperti Nahdliyyin Center, yang menjadi ujung tombak gerakan adalah para relawan lapangannya. Mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat,

bersosialisasi dengan warga, sekaligus melakukan advokasi saat masyarakat dizalimi oleh sistem.

Salah satu orang yang sangat berjasa itu adalah Asrori. Lelaki sederhana ini sehari-hari bekerja sebagai penjual batik eceran. Dari hotel ke hotel atau restoran, dia mendatangi tamu dari luar daerah. Lalu menawarkan dagangan berupa baju atau kaos bermotif batik. Selain itu, Asrori sering mendapat pekerjaan sebagai pencelup batik di pabrik.

Di tengah kondisi ekonominya yang sempit, Asrori masih sempat memberikan tenaganya untuk kemanusiaan. Ratusan masyarakat kurang mampu yang menderita bermacam penyakit, mulai ibu melahirkan hingga anak dan orang tua renta sekalipun dan harus berurusan dengan birokrasi rumah sakit di Kota Pekalongan berhasil ditangani dengan baik. Asrori mendampingi pasien mulai dari pengurusan administrasi, mengecek tempat kamar inap, pengurusan pengobatan hingga biaya rumah sakit. Hal yang semula tampak sulit, berkat sentuhan tangan dinginnya semua menjadi mudah.

Apa yang menjadi modal Asrori hingga bisa melakoni peran bak Sinterklas itu? “Awalnya adalah kesulitan yang pernah saya alami sendiri. Saat itu tahun 2005. Adik saya kena hernia, kondisi ekonomi saya sulit, sementara dia harus mendapat pengobatan,” tutur Asrori.

Akhirnya, untuk pengobatan adiknya, Asrori mengurus persyaratan administratif ke kelurahan, membawa KTP dan KK untuk meminta SKTM. Setelah diperoleh, dia datang ke rumahsakit. “Awalnya saya tidak dihiraukan. Lalu saya menjelaskan kondisi bahwa saya benar-benar tidak punya uang. Mau *mbayar pake apa kalau memang saya tidak punya?*” katanya

Untuk memudahkan pengurusan, Asrori menghubungi anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihannya untuk minta tolong agar prosedur pengurusan dibantu. “Tampaknya anggota dewan itu mengontak Kepala Dinkes. Karena akhirnya, kami mendapat pembebasan biaya,” tambah Asrori.

Sejak saat itulah, Asrori terus membantu siapapun warga yang membutuhkan. Banyak orang mengenalnya sebagai “tukang hubung” yang bisa membebaskan biaya pengobatan. Karena sering dimintai tolong, Asrori harus rela kehilangan pekerjaan tetapnya

sebagai tukang cap batik. “Saya dianggap terlalu sering bolos,” katanya.

Hidup harus terus berlanjut. Lalu, Asrori akhirnya beralih menjadi pembuat layang-layang kertas dan membuka warung kecil di depan rumah itu. Sejatinya, dia juga membuat layang-layang kehidupan bagi sesama yang membutuhkan.

Meskipun peran yang dilakoninya membuat dia di-PHK, toh tak membuat kader NC ini kapok untuk menolong sesamanya demi mendapatkan hak sehat dari pemerintah sebagaimana yang telah dijamin dalam undang-undang. Tak heran jika di lingkungan masyarakat Krappyak, nama Asrori cukup dikenal. Pasalnya, sudah puluhan masyarakat kurang mampu yang pernah ditolong oleh Asrori untuk dapat berobat ke rumah sakit di Pekalongan tanpa harus mengeluarkan uang sepeserpun.

Banyak sudah cerita suka dan duka di balik keberhasilannya menolong warga berobat ke rumah sakit. Sukanya, kalau dia berhasil menolong pasien kemudian bisa sembuh seperti sediakala tanpa harus keluar uang. Bahkan *saking* terkenalnya, yang minta tolong tidak hanya warga di Kota Pekalongan saja, tetapi juga warga Kabupaten Pekalongan yang kebetulan berobat di Rumah Sakit Kraton.

Ceritanya, ketika dia sedang melakukan negosiasi dengan pihak Rumah Sakit Kraton, di dalam ruang rawat inap ada pasien yang sama-sama kurang mampu, mereka dari Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bukan warga Kota. Melihat ada pasien lain yang bisa bebas biaya, pasien itu juga minta tolong bisa gratis biaya pengobatan. Asrori menganjurkan agar pasien itu segera mengurus SKTM, lalu minta disurvei rumahsakit. Alhasil, pasien luar kota itu berhasil gratis juga.

Karena keterbatasan ekonominya, kadang ketika dimintai tolong warga untuk mengurus administrasi yang harus difotocopi, dia *nggak* punya *duit*. “Dari keluarga pasien pun juga tidak memberi biaya, *wong* kami sama-sama miskin,” keluh Asrori.

Agar urusannya lancar, dia harus merogoh kocek sendiri. Yang lebih tragisnya, kadang-kadang untuk bensin motor pun harus rela *ngutang* ke pelanggan dagangannya, agar segala urusannya lancar dulu.

Tapi, itu kisah sebelum Asrori bergabung dengan NC, karena sejak dirinya bergabung dengan Nahdliyyin Center Kota Pekalongan pada tahun 2008, biaya operasional kegiatannya yang berkaitan dengan pendampingan di bidang kesehatan mendapat subsidi dari Nahdliyyin Center.

Tidak hanya pendampingan di bidang kesehatan, advokasi di bidang pendidikan pernah juga dia tangani. Beberapa orang tua murid yang kesulitan membayar SPP di sekolah anaknya, dibantu Asrori dengan cara melakukan pendekatan ke pihak sekolah atau mencari donatur untuk biaya sekolah anak yang kurang mampu. Hasilnya memang dapat dirasakan, sehingga anak yang kurang mampu kembali dapat belajar dengan tenang hingga lulus sekolah.

Apa yang dikerjakan pria kelahiran 1966 ini pada awalnya tak mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Pasalnya, pekerjaan sosial tersebut tidak bisa menghasilkan uang. Alih-alih mundur, hal itu justru membulatkan tekadnya untuk terus melaksanakan pengabdian hingga masyarakat sudah tidak membutuhkan tenaganya lagi. “*Alhamdulillah*, istri saya mendukung penuh,” ucapnya penuh syukur.

Tidak banyak kader NU yang melakoni aktivitas sosial seperti Asrori, seluruh waktu hidupnya dicurahkan untuk mengabdi kepada umat, khususnya di bidang kesehatan. Meski pemerintah telah membuka pintu lebar-lebar pelayanan kesehatan, ternyata tidak banyak masyarakat paham liku-liku birokrasi, meski hal tersebut merupakan hak mereka.】

Apa yang Dilakukan Relawan NC?

Sektor Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, NC menggandeng LPK NU dan Lembaga Kesehatan milik Muslimat, salah satu banom NU. selain itu juga bekerjasama dengan LSM dan pemerintah kota, terutama akses dana APBD. Berikut skema target NC untuk kesehatan.



Menyinergikan antara kerja NC dengan program pemerintah menjadi dasar gerak relawan NC. Berikut beberapa aksi relawan. **Pertama**, mengakses data anggaran Pemkot. Bahkan peran ini sudah sampai pada analisis APBD dan proses advokasi melalui *hearing* dengan dewan, audiensi dengan eksekutif dan berbagai *workshop* terkait kebijakan publik dan regulasi daerah. Hampir seluruh kegiatan yang terkait advokasi anggaran mendapat dukungan penuh dari PATTIRO Pekalongan.

Kedua, menjadi mitra kerjasama Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk melakukan verifikasi kepesertaan Jamkesmas. Sebagaimana disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa persoalan validitas data warga miskin di Kota Pekalongan menjadi salah satu pangkal ketidaktepatan sasaran.

Ketiga, memfasilitasi warga untuk masuk menjadi peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Jamkesmas merupakan program bantuan sosial berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dapat diperoleh secara gratis. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang sehat sehingga tetap produktif. Program ini merupakan bantuan sosial kesehatan bagi masyarakat miskin dengan dana dari pusat melalui Departemen Kesehatan.

Keempat, memfasilitasi masyarakat miskin yang tidak terdaftar Jamkesmas untuk mengakses dana pendamping, yaitu dana yang berasal dari anggaran daerah. Relawan NC mensosialisasikan adanya dana ini dan membantu warga miskin untuk mengurus prosedurnya, mulai dari penyiapan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) hingga masuk ke rumah sakit dan mendapat pembebasan biaya. Prestasi relawan NC sangat menonjol di wilayah ini.

Menurut keterangan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, dalam pelaksanaan program Jamkesmas, yang dijamin adalah biaya pelayanan kesehatan selama pelaksanaannya sesuai dengan prosedur, obat-obatan sesuai formularium dan jenis pelayanannya sesuai pedoman. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat obat-obatan dan pelayanan lain di luar jaminan, maka diperlukan biaya tambahan, untuk itulah dana pendamping dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan Dana Pendamping APBD tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin atau tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang benar-benar bebas iur biaya alias gratis, mulai sarana pelayanan kesehatan Tingkat Pertama sampai Tingkat Lanjutan/rujukan.

Penggunaan dana pendamping itu, salah satunya adalah untuk biaya obat dan perawatan pasien miskin di luar kuota Jamkesmas. Jumlah warga miskin di Kota Pekalongan yang terdaftar pada 2009, mencapai 280.000 jiwa. Namun kouta Jamkesmas yang ada hanya 173.000 jiwa, sehingga kekurangannya ditutupi oleh Pemkot dengan mengeluarkan dana pendamping melalui APBD sebesar Rp 500 juta.

Namun, baru pertengahan tahun 2009, dana tersebut telah habis untuk membantu pembiayaan keluarga miskin yang terpaksa harus rawat inap atau berobat (*Media Indonesia*, 22 Mei 2009). Akhirnya, pada APBD Perubahan 2009, Pemkot menambah dana pendamping sebesar Rp 300 juta (*Suara Merdeka*, 4 Nopember 2009).

Kelima, NC cukup sering menggelar pengobatan gratis massal. Kegiatan ini dalam prakteknya bekerjasama dengan Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPK) NU, sebuah lembaga yang dibentuk PC NU Kota Pekalongan yang anggotanya adalah para kader NU yang berprofesi sebagai dokter dan perawat.

Pengobatan gratis ini sering digelar saat bertepatan dengan momen besar keagamaan atau pada Peringatan Harlah (hari lahir) Nahdlatul Ulama yang jatuh pada bulan Januari. Tidak jarang, dijumpai pasien dengan penyakit yang cukup parah sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. "Untuk kasus seperti ini, relawan NC akan langsung berkomunikasi dengan rumah sakit. Lalu mengadvokasi pasien miskin hingga bebas biaya," kata Ketua NC, Abdul Basyir.

Bersamaan dengan pengobatan gratis, NC juga menggelar kegiatan donor darah. Para pendonor itu selain diambil darahnya juga didata. Data itu berfungsi sebagai bank darah, setiap ada kebutuhan darah dari pasien miskin, tidak perlu menghubungi Palang Merah Indonesia, mereka tinggal mengontak relawan NC dan akan dicariakan golongan darah yang sesuai. Pemerintah Kota Pekalongan juga memberi bantuan mobil ambulan kepada NC. Mobil itu digunakan untuk memberi layanan antar jemput pasien.

Keenam, NC membantu dalam mengakses dana perbaikan rumah warga, yaitu plesterisasi dan sanitasi. Dana itu berasal dari Pemerintah Kota Pekalongan yang telah mencanangkan program pemukiman perkotaan yang aman dan layak huni.

Pemkot Pekalongan memberikan bantuan untuk plesterisasi, pembangunan jamban, dan pembuatan sumur gali. Sistem bantuan untuk rumah aman bagi komunitas miskin dijalankan dengan dua skema untuk dua kelompok sasaran. Bagi keluarga miskin yang produktif—yaitu yang punya usaha produktif—Pemkot memberikan dana stimulan dalam bentuk kredit lunak dengan bunga 6 %. Untuk keluarga miskin yang tidak produktif, diberikan dana dalam bentuk hibah.

Program untuk keluarga miskin produktif didanai dari program rumah swadaya yang berasal dari Menpera. Bantuan hibah bagi keluarga miskin tak produktif didanai dari berbagai sumber: APBD provinsi, APBD Kota Pekalongan, P2KP (DPU) dan KUBE (Depso). Dari skema itu, NC membantu warga membuat proposal pengajuan permohonan bantuan kepada pemerintah. Mendampingi proses verifikasi hingga memastikan dana turun dan rumah terbangun.

Sektor Pendidikan



Pada sektor pendidikan, NC bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Maarif—yaitu lembaga yang berada di bawah koordinasi pengurus Nahdlatul Ulama. Selain itu, skema bantuan adalah dengan mencari donatur individu, mengakses dana BOS dan bantuan lembaga masyarakat.

Inovasi bantuan pendidikan oleh NC kepada siswa tidak mampu antara lain. **Pertama**, pengadaan sepeda *onthel*. Sepeda itu diberikan kepada para siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Sederhana, namun kemanfatannya langsung terasa.

Kedua, membantu proses pengambilan ijazah secara gratis. Ada siswa yang tidak mampu membayar SPP, sehingga ketika lulus, ijazahnya

tidak bisa diambil. NC kemudian membantu melobi kepala sekolah dan bernegosiasi agar dibebaskan. "Ijazah itu kan dipakai untuk mencari kerja. Kasihan jika harus menganggur gara-gara ijazah tak ada," kata Asrori, relawan NC.

Ketiga, membantu mencarikan orang tua asuh bagi siswa tidak mampu. Mereka adalah donatur tetap yang akan menanggung biaya sekolah siswa miskin. Data siswa miskin sudah dimiliki NC yang lalu disodorkan kepada donatur. Dari situ, donatur memilih anak yang akan dibantu

Keempat, NC memfasilitasi pengadaan akte kelahiran murah. Pengurusan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan, bagi bayi yang berusia lebih dari 60 hari sampai dengan satu tahun adalah sebesar Rp 25.000. Harga yang sama juga untuk anak berusia satu hingga lima tahun. Bagi warga miskin bisa mendapat gratis dengan syarat menunjukkan Kartu Miskin. Peran NC adalah membantu pengurusan.

"Kami hanya memfasilitasi. Karena informasi mekanisme yang menggratiskan ini tidak sampai di masyarakat. Itu sebabnya, banyak anak tidak bersertifikat lahir. Orangtuanya takut bayar mahal," kata Asrori.

Sektor Ekonomi

Di wilayah ekonomi, NC menggandeng lembaga permodalan, yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Syirkah Muawanah milik PCNU Kota Pekalongan. Selain lembaga ini, NC juga mengakses kepada para *aghniya* (konglomerat) yang bersedia memodali warga miskin yang akan mengembangkan usaha.



Pertama, NC menggelar diskusi berkala tentang masalah ekonomi. Dari sini, didapat peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh warga. **Kedua**, NC memfasilitasi modal usaha, yang sudah direalisasikan selama ini adalah bantuan becak dan modal tunai. “Warga itu butuh *pancing*, sarana untuk mencari nafkah. Bukan uang yang habis dikonsumsi. Karena itu, becak merupakan salah satu sarana, agar orang bisa mandiri, memberi pekerjaan bagi mereka,” kata Abdul Basyir, Ketua NC.

Ketiga, NC memfasilitasi akses dana dari pemerintah. Program rumah aman bagi komunitas miskin oleh Pemkot Pekalongan, dalam prakteknya dijalankan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya diwujudkan melalui pengembangan dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro di tingkat komunitas. Dengan cara demikian, komunitas berpenghasilan

rendah dapat mengakses dana stimulan yang ditujukan pada keluarga tersebut.

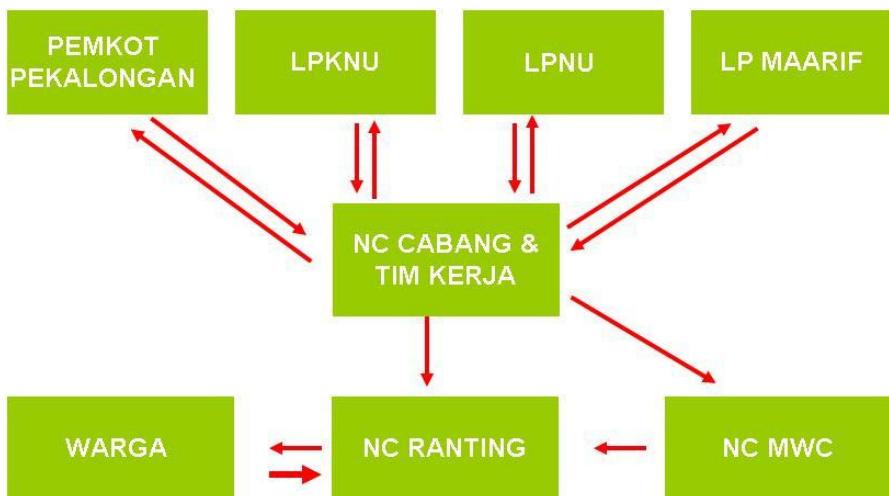
Untuk menjalankan program ini, Pemkot Pekalongan mengoptimalkan peran dan fungsi dari "Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan" dan lembaga masyarakat yang biasa disebut Catur Pilar, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan kelurahan-kelurahan.

NC menyosialisasikan dan mendampingi warga dalam berhubungan dengan birokrasi ini. Bahkan banyak pegiat NC yang masuk menjadi anggota BKM, PKK maupun LPM. Di sini peran strategis ekonomi itu dimainkan. Berikut skema sinergi yang dilakukan oleh NC.



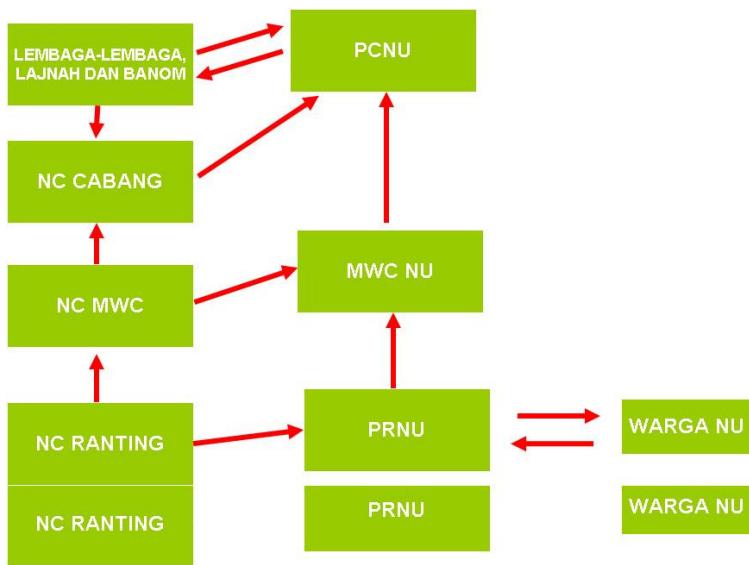
Model Kerja

Kerjasama timbal-balik, dilakukan NC dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Lembaga Pelayanan Kesehatan (LPK) NU, Lembaga Perekonomian (LP) NU dan Lembaga Pendidikan (LP) Maarif. Berikutnya, NC Kota menjadi fasilitator bagi NC Kecamatan dan kelurahan. Dari sana, warga miskin mendapat akses. Berikut skemanya.



Pola Pertanggungjawaban

Setiap langkah yang dilakukan NC harus atas persetujuan Pengurus NU di masing-masing tingkatan. Karena itu secara organisatoris NC langsung di bawah komando dan kendali PCNU Kota Pekalongan. Berikut skema koordinasi dan pertanggungjawaban Nahdliyyin Center dengan struktur NU di tingkat cabang (PC NU), wakil cabang (MWC NU) dan ranting (PR NU).



BAB IV

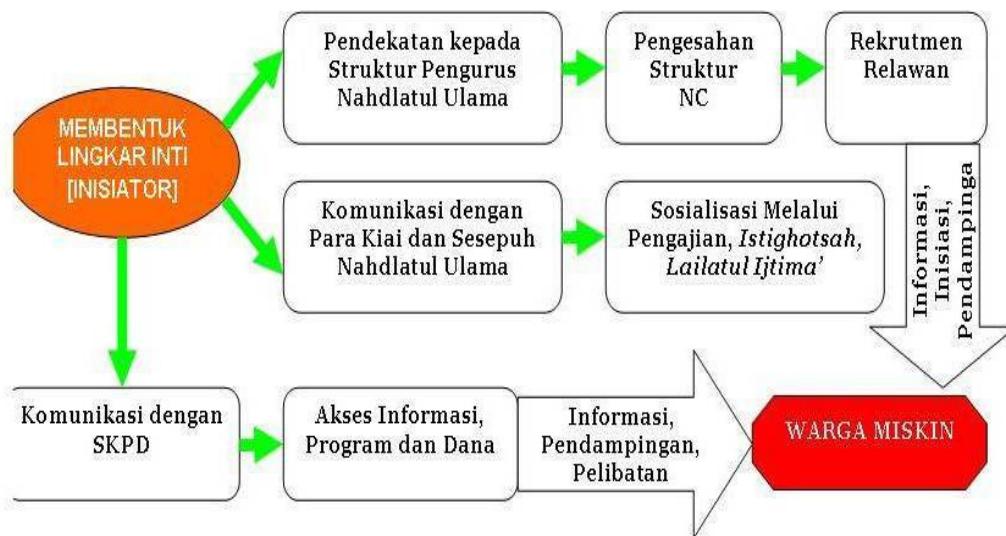
REPLIKASI SUKSES NAHDLIYYIN CENTER

LANGKAH Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan membentuk tim kerja dengan nama Nahdliyyin Center merupakan sebuah langkah maju untuk membantu warga nahdliyyin yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Beberapa pengurus NU di daerah lain sudah melakukan *benchmark*, kunjungan belajar ke Pekalongan. Di antara mereka adalah pengurus NU dari Sumatera Selatan dan PCNU Kota Semarang.

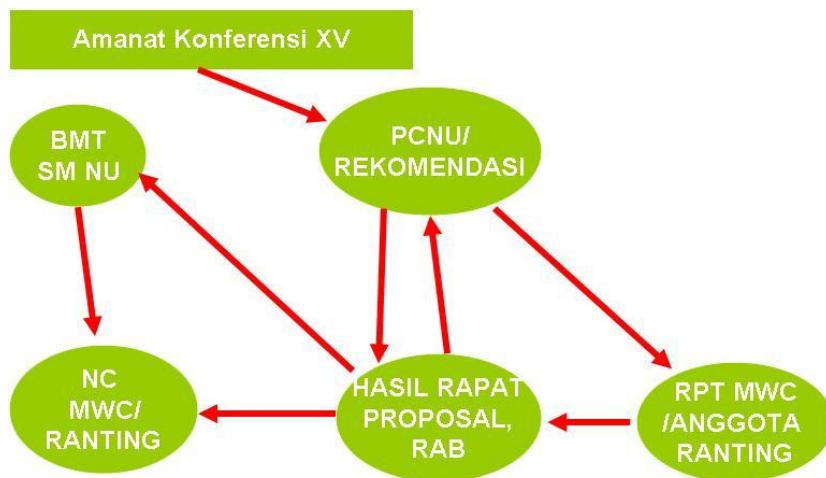
Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU sudah seharusnya mulai menajamkan visinya di bidang sosial yang selama ini kurang tersentuh. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh NU Kota Pekalongan dalam membantu pendampingan warga miskin memperoleh fasilitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi bisa dikembangkan di kota yang lain.

Skema Pembentukan NC

Untuk meringkas apa yang sudah dituliskan pada bab-bab sebelumnya, berikut skema alur pembentukan Nahdliyyin Center di Kota Pekalongan.



Pola Pendanaan



Hidupnya organisasi tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan dana. Karena itu, harus ada skema rancangan untuk “bertahan hidup.” Nahdliyyin Center mendapatkan dana dari beberapa cara. **Pertama**, pendanaan internal. Pegiat NC membuat proposal yang berisi rancangan anggaran biaya untuk aksi para relawan. Proposal itu dibuat berdasar rapat pegiat NC di tingkat kelurahan dan kecamatan. Setelah itu, proposal mendapat persetujuan dari PCNU dan diserahkan kepada BMT Syirkah Muawanah untuk pengeluaran dana.

Skema **kedua** adalah mengakses dana APBD. Pada APBD 2009, NC mendapat bantuan sosial sebesar Rp 25 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan operasional pegiat, pelatihan dan keperluan administratif. Pada APBD 2010, rencananya NC juga mendapat kucuran dengan jumlah sama.

Ketiga, memandirikan organisasi melalui pendirian NC Motor, yang bergerak di bidang usaha jual beli sepeda motor. Untuk permodalan awal, diberikan oleh donatur pengusaha kader NU yang memiliki usaha serupa. Setiap penjualan satu motor, NC mendapat komisi Rp 500 ribu. Uang itu masuk ke kas NC dan digunakan untuk keperluan organisasi. Peluang bisnis yang lain juga sedang dilirik untuk dikembangkan.

Pembenahan Internal

Secara internal organisasi, NC juga terus melakukan pembenahan dan membuat inovasi program. **Pertama**, pembentukan struktur NC tingkat kelurahan. Hingga 2009, sudah berdiri NC di semua kecamatan di Kota Pekalongan dan 16 NC di kelurahan dari 47 Pengurus Ranting NU yang ada.



DILATIH – Pegiat Nahdliyyin Center mendapat pendampingan dan pelatihan dari PATTIRO Pekalongan. Training ini untuk meningkatkan kapasitas sebagai fasilitator masyarakat

Berikut kelurahan yang memiliki NC: Medono, Bendan, Tirto, Tegalrejo (Kecamatan Pekalongan Barat); Krupyak Kidul, Pabean, Degayu, Krupyak Lor, Dukuh dan Panjang Baru (Pekalongan Utara); Gamer dan Sampangan (Pekalongan Timur); Kuripan Kidul, Banyuurip Ageng, Jenggot dan Buaran (Pekalongan Selatan). Pembentukan NC ini bersifat sukarela dan tanpa instruksi.

Kedua, NC Cabang menerbitkan Pedoman Operasional dan Pedoman Teknis. Tujuannya adalah untuk memberi arah yang jelas

tentang mekanisme pembentukan, pelaksanaan, pola pertanggungjawaban dan skema pendanaan bagi NC Kelurahan.

Ketiga, NC Cabang—dengan dukungan PATTIRO Pekalongan—telah membuat film dokumenter tentang aksi kerelawanan NC di bidang pendidikan dan kesehatan. Film yang dikemas dalam bentuk VCD ini kemudian disebarluaskan kepada seluruh *stakeholder* yang berkepentingan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan dan SKPD lain di pemerintah kota. Juga untuk para donatur dan lembaga sosial lain.

Keempat, menyediakan media informasi dan komunikasi dengan masyarakat dalam bentuk *website* yang beralamat di www.nubatik.net. *Website* ini secara umum berisi tentang kegiatan NU Kota Pekalongan. Namun secara khusus memuat kegiatan NC yang integral dengan program NU. Sarana yang lain adalah brosur, leaflet dan buku informasi mengenai prosedur pengurusan administratif layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan perijinan.

Kelima, untuk menunjang validitas aksi kerelawanan, NC membuat *database* warga miskin. Sementara untuk “bank darah,” NC membuat *database* para pendonor darah.

Dampak Umum

Ternyata, selama dua tahun NC berdiri telah membuat dampak tersendiri dalam beberapa hal. **Pertama**, mendorong adanya realokasi anggaran. Dana pendamping dalam APBD 2009 sebesar Rp 500 juta, kemudian ditambah melalui APBD-Perubahan sebesar Rp 300 juta. Bahkan, untuk APBD 2010, dana pendamping dinaikkan menjadi Rp 750 juta. Ini menunjukkan serapan dana pendamping itu sangat maksimal. NC

cukup berjasa dalam “menunjukkan jalan” bagi rakyat untuk mengakses dana itu.

Kedua, reformasi pelayanan publik. NC telah membuat para penyelenggara layanan publik di Pekalongan menjadi lebih memperhatikan kinerja mereka. Misalnya dalam satu kasus, ketika relawan NC mengantar pasien miskin ke rumah sakit, mereka telah mengecek kamar yang kosong terlebih dahulu. Sehingga petugas administrasi tidak bisa mengelak lagi untuk memberi layanan dengan alasan tak ada kamar kosong.

Kini, bila warga miskin didampingi oleh relawan NC untuk mengurus sesuatu, petugas birokrasi lebih cepat dan tanggap. Memang dibutuhkan masyarakat sipil yang tegas untuk mengontrol layanan masyarakat.

Ketiga, reformasi regulasi. NC telah turut mendorong lahirnya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKSBM) Tahun 2009 sebagai Petunjuk Teknis atau Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM).

Program itu merupakan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan dan membuat warga lebih sejahtera, mampu dan mandiri. Beberapa relawan NC juga menjadi Fasilitator Kelurahan (Faskel) untuk program ini.

Keempat, keberadaan relawan NC yang hidup di tengah masyarakat menyebabkan keberanian warga untuk mengakses layanan

menjadi muncul. Jika sebelumnya warga dihadapkan pada rasa takutnya sendiri, minder melihat seragam birokrat, kini mereka sudah sadar dan tahu akan hak-haknya. Dari mereka lalu muncul inisiatif untuk berkembang dan pembangunan daerah tentu lebih partisipatif.

Penutup

Sudah sewajarnya jika kisah sukses Nahdliyyin Center ini bisa menjadi inspirasi bagi warga masyarakat di berbagai komunitas lain, untuk menirunya. Hak umat untuk pelayanan dari *umara* (pemerintah) memang harus dikembalikan. Selama ini hambatan yang muncul adalah ketidaktahuan mekanisme, ditambah ketakutan jika berhadapan dengan birokrasi. Maka, keberadaan *community center*—dalam berbagai bentuk dan inovasinya—merupakan ikhtiar untuk mengembalikan hak umat. □

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Majalah

- Heriyanto, Widi, *Mengelola Informasi Memberdayakan Masyarakat*, (Jakarta: PATTIRO, 2007)
- Purnomo, Aris, dkk, *Mekanisme Komplain agar Pelayanan Publik Lebih Memihak Masyarakat Miskin*, (Jakarta: PATTIRO, 2007)
- Ramkumar, Vivek, *Uang Kami Tanggungjawab Kami* (terj.), (Jakarta: PATTIRO, 2009)
- Sjadzili, A Fawaid (ed.), *Panduan Praktis Bahtsul Masa'il APBD dan Kemiskinan*, (Jakarta: PP Lakpesdam NU, 2008)
- Wahid, KH Abdurrahman, "Moralitas: Keutuhan dan Keterlibatan," *Tempo* 17 Juni 1978
_____, "Agamawan dan Pembangunan Desa," *Tempo*, 1 Juli 1978
- Wibowo, Agus (ed.), *Peran Community Centre dalam Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik*, (Jakarta: PATTIRO, 2007)

Koran dan Internet

- Nahdliyyin Center Bantu Rehab, *Radar Tegal*, 26 Desember 2007
- NU Bentuk Nahdliyyin Center, *Radar Pekalongan*, 15 Januari 2008
- Pelatihan Pegiat Nahdliyyin Center Ditutup, *Radar Pekalongan*, 29 Februari 2008
- 425 Pasien Ikut Kegiatan Pengobatan Gratis, *Radar Pekalongan*, 5 Januari 2009
- Sosialisasi PPK Kurang Maksimal, *Radar Pekalongan*, 3 November 2008
- Bank Darah Nahdliyyin Center Siap Donor, *Suara Merdeka*, 7 Januari 2009
- Warga Berharap Pengobatan Gratis Terus Diadakan, www.nu.or.id, 7 Januari 2009
- NU Bisa Jadi Ormas Pelopor dalam Menanggulangi Masalah Kesehatan, *Radar Pekalongan*, 12 Januari 2009
- Pengobatan Gratis Diserbu Pasien, www.nu.or.id, 21 Januari 2009
- Nahdliyyin Center Rapatkan Barisan, www.nubatik.net, Selasa, 12 Mei 2009
- Jamkesmas Belum Banyak Dipahami, *Suara Merdeka*, 8 Agustus 2009
- Dana Pendamping Kesehatan Kota Pekalongan Habis, *Suara Merdeka*, 4 Nopember 2009

Dokumen

Naskah Konferensi Cabang XV Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, "Dari NU untuk Bangsa, Menuju Kota Pekalongan yang Bersih dan Bermartabat," (Pekalongan: PC NU Kota Pekalongan, 2007)

Pedoman Operasional Nahdliyyin Center Kota Pekalongan

Pedoman Teknis Nahdliyyin Center Kota Pekalongan

Wawancara dengan Abdul Basyir, Desember 2009

Wawancara dengan Zaenal Muhibin, Asrori, Aminudin Aziz, Sodikin, dan Rimazun, Desember 2009

LAMPIRAN 1

PEDOMAN OPERASIONAL NAHDLIYYIN CENTER

PENDAHULUAN

Bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam karena ajarannya mendorong kegiatan para pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akherat.

Bahwa para ulama *ahlus sunnah wal jama'ah* Indonesia terpanggil untuk melanjutkan dakwah Islamiyah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dalam suatu wadah yang bernama NAHDLATUL ULAMA yang bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam menurut faham *ahlussunnah wa jama'ah*.

Bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga NAHDLATUL ULAMA menuju *khaira ummah* adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan memandang perlu program-program NU ke depan berorientasi kepada kemaslahatan dan kesejahteraan warga nahdliyyin. Maka tiga hal yang menjadi sasaran garapan, yakni perekonomian, pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian secara khusus oleh Pengurus NU di semua tingkatan.

Bahwa untuk merealisasikan tiga bidang garapan tersebut, di samping mengoptimalkan peran Pengurus NU, Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom di semua tingkatan, Pengurus Cabang NU Kota Pekalongan perlu membentuk satuan tugas atau kelompok kerja di semua tingkatan dengan nama "NAHDLIYYIN CENTER" agar ketiga program tersebut dapat berjalan dan tepat sasaran sesuai amanat Konferensi Cabang XV Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan tahun 2007.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka disusunlah pedoman operasional sebagai berikut :

BAB 1 **PENGERTIAN, STATUS DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

NAHDLIYYIN CENTER adalah nama tim kerja di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang bertugas membantu memotivasi, menfasilitasi dan advokasi (pendampingan) warga nahdliyyin di Kota Pekalongan khususnya dalam bidang perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

Pasal 2

Nahdliyyin Center merupakan tim kerja dan bertanggung jawab langsung kepada ketua tanfidziyah di masing-masing tingkatan dan dapat melakukan akses ke lembaga, lajnah dan badan otonom serta ke pihak eksternal sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pasal 3

Nahdliyyin Center berkedudukan :

- a. Tingkat Cabang
- b. Tingkat Ranting

BAB II **LAMBANG**

Pasal 4

Lambang Nahdliyyin Center berupa gambar bola dunia yang di dalamnya terdapat bintang berjumlah 9 dalam formasi berjejer setengah lingkaran. Kemudian di luarnya terdapat tulisan Nahdliyyin Center melingkar.

BAB III **TUJUAN**

Pasal 5

1. Tujuan Umum: Terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan warga nahdliyyin sesuai dengan prinsip ajaran ahlus sunnah wal jama'ah.
2. Tujuan Khusus:
 - Mendorong warga nahdliyyin agar memiliki akses, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
 - Mengajak warga nahdliyyin untuk lebih peduli terhadap permasalahan warga masyarakat.
 - Membantu menyelesaikan berbagai permasalahan warga di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

BAB IV **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 6

Nahdliyyin Center memiliki tugas pokok yaitu :

1. Membantu Pengurus NU di masing-masing tingkatan dalam melaksanakan program-program kerja NU, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
2. Membantu Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom di masing-masing tingkatan dalam melaksanakan program kerja, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Pasal 7

Nahdliyyin Center berfungsi sebagai

1. Pusat data (data base) NU dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
2. Fasilitator bagi warga nahdliyyin yang berhubungan dengan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
3. Advokat/pendamping terhadap setiap permasalahan warga, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
4. Pusat Informasi setiap kebijakan publik, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
5. Pusat penguatan SDM bagi warga nahdliyyin.

BAB V **ORGANISASI**

Pasal 8

1. Kepengurusan Nahdliyyin Center tingkat cabang, berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) koordinator dan 8 (delapan) orang anggota
2. Kepengurusan Nahdliyyin Center tingkat Ranting 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) koordinator dan 8 (delapan) orang anggota.
3. Anggota Pengurus Nahdliyyin Center di masing-masing tingkatan berasal dari semua unsur di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pasal 9

Tim kerja Nahdliyyin Center bersifat tetap, bukan bersifat sementara.

Pasal 10

Segala aktivitas Nahdliyyin Center harus dikoordinasikan dengan Pengurus NU di masing-masing tingkatan dalam mengambil keputusan, kebijakan serta langkah-langkah strategis.

Pasal 11

1. Setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Nahdliyyin Center Ranting harus dikoordinasikan ke Nahdliyyin Center Cabang.
2. Setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Nahdliyyin Center di masing-masing tingkatan harus dilaporkan ke Pengurus NU di masing-masing tingkatan.

Pasal 12

Masa kepengurusan Nahdliyyin Center mengikuti periodesasi Pengurus NU di masing-masing tingkatan.

BAB VI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 13

1. Biaya operasional Nahdliyyin Center diperoleh dari NU dan atau digali dari sumber-sumber dana di lingkungan NU, Ummat Islam maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
2. Sumber-sumber dana dikelola dan dilaporkan secara rutin setiap tiga bulan sekali kepada Pengurus NU di masing-masing tingkatan.

Pasal 14

Kekayaan Nahdliyyin Center yang berupa harta bergerak dan atau harta tidak bergerak harus dicatat sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama.

BAB VII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 15

Pembubaran Nahdliyyin Center dapat dilakukan apabila sudah tidak diperlukan dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan dan disahkan pada Konfercab NU.

Disahkan pada tanggal 5 April 2008
Tempat di: Kota Pekalongan

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan
H. Ahmad Rofiq BA

LAMPIRAN 2

SUSUNAN PENGURUS NAHDLIYYIN CENTER KOTA PEKALONGAN PERIODE 2007 – 2012

Penasehat :

1. H. Abu Almafachir
2. KH. Ahmad Dananir
3. KH. Baghdadi, S.Ag
4. Hj. Umi Salamah
5. Aminuddin Aziz, SE
6. dr. H. Muhammad Jaelani
7. Drs. H. Khumaedi
8. M. Subhan Mustofa
9. H. Suryo P., S.Pd, SKM, M.Kes.

Ketua : Abdul Basyir, SH

Wakil Ketua : Budhi Prathamo, ST

Wakil Ketua : Dra. Nur Hasanah

Sekretaris : Zainal Muhibin, S.Pd

Wakil Sekretaris: Muhammad Lutfi

Wakil Sekretaris: Shofrotun Ali

Bendahara : H. Imron Asfuri

Wakil Bendahara : Hj. Khusnul Khotimah

Wakil Bendahara : Faizah, S.Pd

Bidang-bidang :

1. Advokasi : Abdurrahman, SHI
 - a. Pendidikan : Rimazun
 - b. Kesehatan : Asrori
 - c. Ekonomi : Saeful Huda, S.Pd.
2. Hubungan Antar Lembaga & Humas:
Fahrudin Rahmat
3. Pengolahan Data & Distribusi Informasi:
Kurnia Lestari

Pekalongan, sebuah kota pesisir utara di Jawa Tengah. Mayoritas penduduknya warga NU, dan terkenal dengan julukan Kota Batik. Persoalan sosial di kota itu juga cukup kompleks, dan NU telah memprakarsai pembentukan community center—yang dinamai Nahdliyyin Center—sebagai bagian tidak terpisahkan dalam strukturnya. Posisinya sebagai tim kerja tetap. Inisiatif kepengurusan NU Kota Pekalongan layak ditiru oleh ormas Islam yang lain—khususnya organisasi NU di daerah lain. Potensi anggota, jaringan, akses dan fasilitas infrastruktur ormas Islam menjadi penopang suksesnya pembentukan “lembaga pelayanan masyarakat” ini.

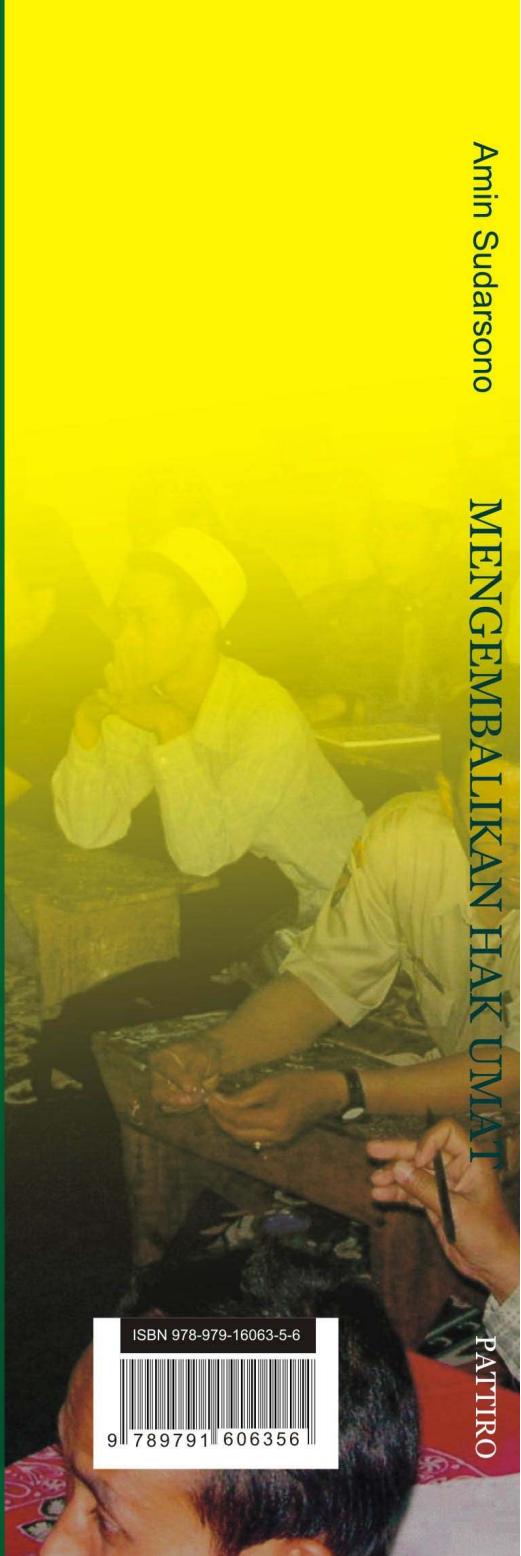
Buku ini akan memapar penjelasan tentang community center, yang keberadaannya niscaya, saat regulasi tentang keterbukaan informasi publik ditetapkan melalui UU No 14 tahun 2008. Dilanjutkan pengalaman Nahdliyyin Center dalam mengokohkan bangunan organisasinya. Termasuk kisah sukses para relawan NC dalam advokasi kesehatan, pendidikan dan kesehatan.



PATTIRO



The Asia Foundation



ISBN 978-979-16063-5-6



9 789791 606356